

ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (Studi Model CIPP Pada SMK di Kabupaten Lampung Barat)

Oleh

YESI MERINDA

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan evaluasi deskriptif mengenai kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat. Metode yang digunakan adalah pendekatan evaluasi deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari BAPPEDA, Kepala Dinas Pendidikan, kepala sekolah, bendahara BPP, guru, siswa dan tokoh masyarakat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Evaluasi konteks kebijakan ini memiliki dasar yang jelas sejak awal disusun berdasarkan fakta dari dinas pendidikan, kemudian tujuan yang ditetapkan berdasarkan dasar kebijakan telah menunjukkan pencapaian, serta dalam proses penyusunan nya kebijakan ini telah melibatkan berbagai stakeholder yang berkaitan; (2) Evaluasi input pihak pemerintah daerah telah memiliki kesiapan anggaran dan analisis jangka panjang yang baik terkait dengan pelaksanaan kebijakan ini, kesiapan SDM sekolah sebagai objek pelaksana kebijakan ini juga telah siap dan tidak terdapat penolakan dari para personil sekolah baik pendidik maupun siswa, serta dalam hal respon dan partisipasi masyarakat telah diberikan respon dan partisipasi yang positif dalam kebijakan ini; (3) Evaluasi proses penyaluran dana telah secara baik difahami oleh semua pihak dan tidak memberikan ambiguitas makna penyaluran, pelaksanaan disekolah dapat berjalan dengan sesuai aturan yang ditetapkan, dan dalam hal kendala belum terdapat kendala yang berarti; (4) Evaluasi produk monitoring dilakukan dengan baik, guru dan siswa merasa termotivasi, dan memberikan efek jangka panjang pada peningkatan APK.

Kata Kunci : Evaluasi, Kebijakan dana BPP, Model CIPP

ABSTRACT

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION ASSISTANCE FUND EDUCATION POLICY (CIPP Model Study On Vocational in West Lampung)

By

YESI MERINDA

The purpose of this study is to provide a descriptive evaluation of the implementation of education aid policy in West Lampung. The method used is descriptive approach to evaluation by interview, observation and documentation. Informants consisted of BAPPEDA, Dept. of Education, principals, treasurer BPP, teachers, students and community leaders.

The results of this study indicate that (1) Evaluation of the context of this policy have a clear basis since the beginning is based on the fact of the education, then the goals set by the basic policy has demonstrated achievement, as well as in the formulation of its policy has involved various stakeholders related; (2) Evaluation of input local authorities have had the readiness of the budget and long-term analyzes are both related to the implementation of this policy, readiness of human resources of the school as an object implementing this policy has also been prepared and there is no resistance from school personnel both educators and students, as well as in terms of response and participation has been given a positive response and participation in this policy; (3) Evaluation process of channeling funds have been well understood by all parties and did not leave ambiguity of meaning the distribution, implementation of school can be run according to the rules set forth, and in case there are problems yet significant constraints and; (4) Evaluation monitoring products performed well, teachers and students feel motivated, and provide long-term effect on increasing the APK.

Keywords: Evaluation, Policy BPP fund, CIPP Model

**EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
(STUDI MODEL CIPP PADA SMK DI KABUPATEN LAMPUNG BARAT)**

(Tesis)

Oleh :

YESI MERINDA

NPM. 1423012026



**PROGRAM PASCASARJANA MANAJEMEN PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis : **EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
(Studi Model CIPP pada SMK di Kabupaten
Lampung Barat)**

Nama Mahasiswa : **Yesi Merinda**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1423012026

Program Studi : Manajemen Pendidikan

Jurusan : Ilmu Pendidikan

Fakultas : Keguruan dan Ilmu Pendidikan



MENYETUJUI

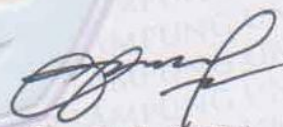
1. Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Riswanti Rini, M.Si.
NIP 19600328 198603 2 002

Pembimbing II



Dr. Sowiyah, M.Pd.
NIP 19600725 198403 2 001

2. Mengetahui

Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan



Dr. Riswanti Rini, M.Si.
NIP 19600328 198603 2 002

Ketua Program Studi
Magister Manajemen Pendidikan



Dr. Irawan Suntoro, M.S.
NIP 19560323 198403 1 003

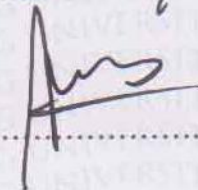
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Riswanti Rini, M.Si.



Sekretaris : Dr. Sowiyah, M.Pd.



Penguji Anggota : I. Dr. Abdurrahman, M.Si.



II. Dr. Irawan Suntoro, M.S.

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Dr. Muhammad Euad, M.Hum.
NIP. 19590722 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 19530528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian : 28 Juni 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tesis dengan judul “Evaluasi Kebijakan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (Studi Model CIPP Pada SMK di Kabupaten Lampung Barat)” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya tulis lain dengan cara tidak tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2016
Pembuat Pernyataan



Merinda
Yesi Merinda
NPM. 1423012026

RIWAYAT HIDUP



Yesi Merinda dilahirkan di Desa Tribudisyukur Kabupaten Lampung Barat pada tanggal 03 Oktober 1987. Penulis merupakan anak keempat dari lima bersaudara pasangan Bapak Kokom Asyid,SP dan Ibu Sumiyati,S.Pd SD

Penulis menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak di TK Negeri 1 Purajaya, pendidikan dasar di SD Negeri 1 Tribudisyukur, pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 7 Kotabumi Lampung Utara, Serta pendidikan menengah atas di SMA Negeri 3 Kotabumi Lampung Utara. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tahun 2004, penulis melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Lampung pada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan program studi pendidikan Bimbingan dan Konseling, dan meraih gelar sarjana pendidikan pada tahun 2009. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan ditempatkan sebagai guru pada SMK Negeri 1 Kebun Tebu

Keinginannya untuk terus memperdalam ilmu dalam dunia pendidikan agar dapat terus memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan mengantarkannya kini menjadi mahasiswa Pascasarjana Program studi Manajemen Pendidikan Universitas Lampung

MOTTO

“Kehidupan itu laksana lautan: ” Orang yang tiada berhati-hati dalam mengayuh perahu, memegang kemudi dan menjaga layar, maka karamlah ia digulung oleh ombak dan gelombang. Hilang di tengah samudera yang luas. Tiada akan tercapai olehnya tanah tepi”. (BUYA HAMKA)

PERSEMBAHAN



Segala Puji Bagi Allah SWT, Dzat Yang Maha Sempurna
Sholawat serta Salam Selalu Tercurah Kepada Uswatun Hasanah Rosululloh
Muhammad SAW

Kupersembahkan karya kecil ini sebagai tanda cinta & kasih sayangku kepada:

Ayah dan Ibuku tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh cinta kasih dan pengorbanan yang tulus serta selalu mendo'akan yang terbaik untuk keberhasilan dan kebahagiaanku.

Kakak-kakak dan adikku yang telah memberikan dukungan dalam semangat kekeluargaan

Seluruh keluarga besar yang terus memberikan do'anya, terima kasih.

Para pendidik yang telah mengajar dan mendidik dengan penuh kesabaran.

Semua Orang yang pernah hadir dalam hidupku sebagai siapapun itu, yang telah memberi banyak pelajaran kehidupan bagi ku.

Almamater Universitas Lampung tercinta

SANWACANA

Penulis memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat selesai sesuai dengan harapan.

Karya tulis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Pendidikan pada Program Pascasarjana Manajemen Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan dana BPP di Lampung Barat dengan menggunakan model evaluasi CIPP

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr.Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. Rektor Universitas Lampung sebagai penanggung jawab pada level Universitas yang telah mengizinkan penulis untuk menempuh pendidikan di Universitas Lampung
2. Prof. Dr. Sudjarwo M.S., Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung sebagai penanggung jawab pada level Program yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis

3. Dr. Muhamad Fuad, M.Hum., Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sebagai penanggung jawab pada level Fakultas yang telah memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan proses penyelesaian penelitian ini
4. Dr. Riswanti Rini, M.Si., Ketua Jurusan Ilmu Pendidikan sekaligus Pembimbing Akademik dan Pembimbing pertama yang telah memberikan begitu banyak motivasi, masukan, saran dan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini
5. Dr. Irawan Suntoro, M.S., Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sebagai penanggung jawab Program Studi, sekaligus sebagai Pembahas yang telah memberikan bimbingan dan kemudahan kepada penulis
6. Dr. Sowiyah, M.Pd selaku Pembimbing kedua yang telah memberikan banyak bimbingan dan masukan yang sangat substansial dan berarti bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini ditengah segala aktivitas dan kesibukan beliau
7. Seluruh Dosen Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memberikan pengetahuan, wawasan dan diskusi yang mencerahkan.
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat, Pihak BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat, serta pihak SMK N 1 Liwa dan SMK N 1 Kebun Tebu yang telah menjadi mitra dalam penelitian ini
9. Keluarga ku yang telah memberikan dukungan yang begitu besar kepada penulis selama menjalani pendidikan
10. Teman-teman Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang senantiasa

memberi dukungan moral dan material serta teman diskusi di dalam dan luar kelas.

11. Mas Bagio, Mas Dwi dan Staf Sekretariat Pascasarjana Manajemen Pendidikan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung yang telah memfasilitasi kelancaran kegiatan akademik di lingkungan Pascasarjana Manajemen Pendidikan FKIP Unila.

Sebagai penutup, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi perkembangan kebijakan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat khususnya. Atas semua saran dan masukan konstruktif yang diberikan, penulis menghaturkan terimakasih.

Bandar Lampung, Juli 2016

YESI MERINDA
NPM. 1423012026

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
LEMBAR PERNYATAAN.....	x
SANWACANA.....	xii
RIWAYAT HIDUP.....	xiii
MOTTO.....	xiv
LEMBAR PENGESAHAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	9
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Kegunaan Penelitian.....	10
1.6 Definisi Istilah.....	11
BAB II KAJIAN TEORI	
2.1 Manajemen Pendidikan.....	14
2.1.1 Pengertian Manajemen Pendidikan	14
2.1.2 Fungsi Manajemen Pendidikan.....	15
2.2 Konsep Kebijakan Pendidikan.....	18
2.2.1 Pengertian Kebijakan Pendidikan.....	18
2.2.2 Fungsi dan Jenjang Kebijakan.....	23
2.2.3 Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan	25
2.2.4 Tahapan Kebijakan Pendidikan	27
2.2.5 Desentralisasi Kebijakan	38
2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah	42
2.4 Kebijakan Dana BPP Lampung Barat.....	44
2.5 Evaluasi Program.....	48
2.6 Model-Model Evaluasi Program.....	53
2.6.1 Model Goal Free Oriented	53

2.6.2 Model Goal Free Evaluation	54
2.6.3 Model Evaluasi Sumatif dan Formatif	54
2.6.4 Model Evaluasi Countenance.....	55
2.6.5 Model Evaluasi CSE-UCLA.....	55
2.6.6 Model Evaluasi CIPP.....	55
2.7 Penelitian Yang Relevan.....	61
2.8 Kerangka Pikir	67

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Latar Penelitian	68
3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian.....	72
3.3 Kehadiran Peneliti.....	74
3.4 Sumber Data Penelitian.....	78
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	80
3.6 Analisis Data.....	83
3.7 Pengecekan Keabsahan Data	87
3.8 Tahapan Penelitian.....	89

BAB IV PAPARAN DATA, TEMUAN, DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	91
4.1.1 Gambaran SMK N 1 Liwa	91
4.1.2 Gambaran SMK N 1 Kebun Tebu	92
4.1.3 Profil Kabupaten Lampung Barat	94
4.2 Paparan Data Hasil Penelitian.....	96
4.2.1 Evaluasi Konteks.....	97
4.2.1.1 Dasar Kebijakan	97
4.2.1.2 Tujuan	100
4.2.1.3 Penyusunan Kebijakan.....	103
4.2.2 Evaluasi Input.....	107
4.2.2.1 Kesiapan Anggaran Daerah.....	107
4.2.2.2 Kesiapan SDM Sekolah	109
4.2.2.3 Respon dan Partisipasi Masyarakat.....	110
4.2.3 Evaluasi Proses	112
4.2.3.1 Penyaluran Dana	113
4.2.3.2 Pelaksanaan Di Sekolah.....	115
4.2.3.3 Kendala Pelaksanaan.....	116
4.2.4 Evaluasi Product.....	118
4.2.4.1 Monitoring	118
4.2.4.2 Motivasi Guru	119
4.2.4.3 Motivasi Siswa.....	121
4.2.4.4 APK.....	122
4.3 Temuan Penelitian.....	123
4.3.1 Evaluasi Konteks.....	123
4.3.2 Evaluasi Input.....	124
4.3.3 Evaluasi Proses	125
4.3.4 Evaluasi Product.....	126

4.4 Pembahasan.....	129
4.4.1 Evaluasi Konteks.....	129
4.4.2 Evaluasi Input.....	129
4.4.3 Evaluasi Proses	130
4.4.4 Evaluasi Product.....	133
4.5 Keterbatasan Penelitian.....	134
4.6 Model Hipotetik	142
BAB V KESIMPULAN,IMPLIKASI DAN SARAN	143
5.1 Kesimpulan	143
5.2 Implikasi.....	146
5.2 Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA	151

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Evaluasi Model CIPP.....	59
2.2 Kerangka Fikir Penelitian.....	67
4.1 Evaluasi Konteks Kebijakan dana BPP.....	123
4.2 Evaluasi Input Kebijakan dana BPP.....	125
4.3 Evaluasi Kebijakan dana BPP.....	126
4.4 Evaluasi Produk Kebijakan dana BPP (alur Monitoring).....	127
4.5 Pengembangan Model Hipotetik Hasil Penelitian.....	142

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.1 Formulasi Kebijakan William Dunn.....	26
3.1 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti.....	68
3.2 Daftar Nara Sumber	70
3.3 Alur Sumber Data	71
4.1 Sebaran Matriks Penelitian	87
4.2 Data APK SMA/SMK Kabupaten Lampung Barat	91
4.3 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Konteks	95
4.4 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Input	99
4.5 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Proses	104
4.6 Matriks Hasil Penelitian Evaluasi Produk	108
4.7 Tabel Pos Anggaran Dana BPP	113

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Kisi Kisi Wawancara
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara
- Lampiran 3. Peraturan dan UU
- Lampiran 4. Foto
- Lampiran 5. Surat Keterangan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang Masalah

Pendidikan merupakan hal yang esensial untuk pembangunan berkelanjutan dan merupakan hak asasi yang fundamental. Pendidikan juga memiliki relevansi langsung terhadap kesejahteraan dan kebebasan manusia serta berperan secara tidak langsung terhadap perubahan sosial masyarakat dan produktivitas ekonomi. Dengan kata lain, pendidikan merupakan pondasi untuk sendi-sendi kehidupan. Oleh karena itu kepada pendidikan pengembangan sumber daya manusia bergantung.

Kebijakan pendidikan merupakan pendorong bagi lahirnya sistem pendidikan yang baik yang menyangkut konteks partisipasi pendidikan dan mempertimbangkan arah perbaikan mutu dan kualitas pendidikan. Kebijakan akan menentukan arah angin dunia pendidikan, seperti halnya berbagai contoh yang telah dilakukan oleh negara maju dan berkembang bagaimana kemudian kebijakan pendidikan di negara-negara tersebut menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan, karena meyakini bahwa kebijakan pendidikan akan memiliki *return of value* (nilai balik) yang strategis bagi perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

Pendiri bangsa Indonesia sangat sadar arti penting pendidikan, sehingga urusan pendidikan menjadi amanat undang-undang negara ini. Siapapun pemimpin bangsa ini harus menjunjung tinggi amanat tersebut. Berkenaan dengan tugas menjalankan amanat itu pemimpin negara ini senantiasa mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai macam produk hukum sebagai payung dalam mengupayakan bangsa yang cerdas dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.

Bangsa Indonesia dihadapkan dengan pilihan yang harus menjadi prioritas, yakni pemerataan pendidikan. Sedangkan pemerataan akan mengesampingkan mutu. Hal ini dikarenakan luas dan besarnya bangsa Indonesia. Bentuk upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan adalah dicanangkan wajib belajar. Wajib belajar diawali dari wajib belajar enam tahun dan sembilan tahun.

Bersamaan dengan bergulirnya wajib belajar, lahir dan tumbuh era otonomi daerah. Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membangun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan skala prioritas dan potensi daerah. Kebijakan pendidikan di daerah dalam konteks otonomi daerah dikaitkan dengan kebijakan publik adalah UU 32 tahun 2004 yang menyatakan bahwa urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan, dan kebijakan pendidikan nasional.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 berkenaan dengan kebijakan pendidikan nasional, terdapat dua hal khusus *pertama*, menetapkan alokasi dana pendidikan sekurang-kurangnya 20% baik pada APBN

dan APBD, *kedua*, pasal 11 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan baik setiap warga Negara.

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya sumber daya guna terselenggaranya pendidikan murah namun berkualitas bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun yang dikenal sebagai wajib belajar sem

bilan tahun.

Keberhasilan pembangunan di daerah dalam konteks era otonomi saat ini sangat ditentukan oleh kemampuan aparat daerah dalam merumuskan program/kebijakan untuk dilaksanakan oleh aparat pemerintah dan kelompok-kelompok masyarakat yang ikut serta bersama-sama melaksanakan program/kebijakan yang telah diputuskan, yang harusnya didukung oleh sarana dan prasarana yang ada.

Pemerintah merespon undang-undang tersebut dengan merumuskan kebijakan program pendidikan gratis. Kebijakan program pendidikan gratis merupakan salah satu kebijakan pemerintah pusat mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sering disebut Wajib Belajar (WAJAR) 9 tahun. Sumber pendanaannya berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS). Bantuan Operasional Sekolah adalah satu upaya pemerintah dalam mengimplementasikan konstitusi tentang hak seluruh masyarakat dalam mendapatkan pendidikan. Akan tetapi program ini belum sampai pada tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sehingga menjadi

permasalahan tersendiri bagi masyarakat yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas.

Yoyon (2011:79) menegaskan bahwa : Ada tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam desentralisasi pendidikan, yaitu: apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga memperoleh haknya dalam pendidikan? Dan apakah dengan pemberian wewenang menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Dan apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di daerah dapat mencapai hasil hasil pendidikan yang bermutu?

Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merespon kebijakan pendidikan nasional dengan menentukan kebijakan pemberian bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan di semua level hingga pada level menengah atas sebagai salah satu program andalan yang diberi nama kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan.

Prioritas pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan ini seperti juga tertuang dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Lampung Barat untuk tahun 2012-2017 yang disadur penulis dari pihak BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat, dalam analisis isu strategis bidang pendidikan dinyatakan bahwa permasalahan pembangunan dalam bidang pendidikan salah satunya adalah mengenai persentase jumlah anak putus sekolah pada jenjang pendidikan menengah yang perlu untuk diturunkan. (RPJMD Lengkap terlampir), berkaitan dengan permasalahan pembangunan tersebut maka

analisis isu strategis pihak pemerintah melahirkan kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan ini.

Kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Lampung Barat dalam hal bantuan dana penyelenggaraan pendidikan ini ditujukan agar terjadi peningkatan pendidikan anak-anak usia sekolah dan angka putus bersekolah dapat berkurang. Kebijakan ini pada awal pelaksanaannya diatur dalam peraturan daerah No.05 tahun 2009 tentang pelaksanaan pendidikan gratis dan mengalami revisi tiga kali hingga tahun 2015 ini oleh di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Hal ini menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Lampung Barat yakni gerakan membangun Lampung Barat menuju masyarakat sejahtera, maju dan mandiri serta berdaya saing salah satunya dengan meneruskan layanan pendidikan yang semakin berpihak kepada masyarakat terutama dalam konteks pendanaan.

Kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Barat ini bukanlah satu satunya di Provinsi Lampung, tapi merupakan salah satu daerah yang menjadi pelopor dalam kebijakan pemberian subsidi dana pendidikan hampir penuh oleh pemerintah daerah dalam mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam hal pendidikan. Dan baik jika dikawal dan dipantau bersama oleh semua pihak yang juga peduli terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat.

Data empirik yang didapat penulis melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat menunjukkan bahwa kebijakan ini menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan APK dan APM terutama dalam jenjang SMA/SMK. Pada tahun 2008 sebelum dilaksanakannya kebijakan ini angka partisipasi kasar pada jenjang menengah masih cukup rendah yakni sebesar 40,06 %, pada tahun 2012 sejak

diterapkannya kebijakan ini data APK pada jenjang SMA/SMK menunjukkan pencapaian yang cukup signifikan yakni sebesar 29,19 % hingga menjadi 69,25 %. Terakhir data APK yang penulis dapatkan dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2015 adalah sebesar 83,87 %, ini artinya angka partisipasi kasar pendidikan tingkat SMA/SMK sebelum, pada saat sedang, dan setelah diterapkannya kebijakan ini sampai saat ini menunjukkan pencapaian yang sangat baik dalam konteks partisipasi pendidikan pada tingkat SMA/SMK. Ini artinya bahwa kebijakan ini sangat membantu masyarakat untuk dapat terus menyekolahkan anaknya hingga jenjang SMA/SMK.

William Dunn (2000:513) menegaskan bahwa dalam memantau kebijakan ada dua jenis akibat yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan diantaranya adalah barang, sumber daya, dan layanan yang diterima oleh sekelompok penerima (*beneficiaries*). Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

Kontruksi yang diungkap oleh William Dunn tersebut merupakan hal yang penting bagi sebuah kebijakan untuk dilakukan sebuah deskripsi evaluasi terhadap kebijakan tersebut, tidak hanya tentang implementasinya dilapangan namun secara menyeluruh dari semua aspek dalam kebijakan tersebut sebagai bentuk bahwa kebijakan tersebut telah mengalami sebuah proses reduksi oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Adapun peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) bantuan dana penyelenggaraan pendidikan adalah Peraturan Bupati Lampung

Barat Nomor 07 Tahun 2015, yang memiliki tujuan besar ingin mewujudkan pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan akses bagi seluruh masyarakat. Juga Peraturan Bupati Nomor 09 Tahun 2015 tentang petunjuk teknis (Juknis) Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang merinci lebih jelas tentang pos dan penggunaan plafon anggaran bantuan tersebut.

Kebijakan bantuan dana penyelenggaraan pendidikan ini telah mengalami beberapa perkembangan sampai dengan saat ini. Saat ini seluruh jenjang pendidikan telah di berikan bantuan dana ini tanpa terkecuali, dan salah satu implikasi yang secara kasat mata terlihat bahwa sekolah tidak lagi melakukan pungutan dana komite terhadap orang tua siswa, tentu saja ini menjadi adaptasi yang tidak mudah bagi pihak sekolah.

Kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan ini baik rasanya jika terus dikawal oleh semua pihak yang peduli terhadap perkembangan kebijakan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat, namun sejauh ini pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat sebagai subjek pelaksana sepertinya masih jarang mendapat masukan apalagi jika masukan itu berupa produk intelektual yang dapat dipertanggungjawabkan kebasahannya secara ilmiah

Alasan tersebut yang menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang kebijakan ini. Penelitian yang penulis lakukan adalah evaluasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan evaluasi model *Contxt, Input, Process,* dan *Product* (CIPP). Evaluasi pendekatan CIPP bertujuan membedah lebih jauh program ini dalam konteks latar belakang yang mendasari lahirnya kebijakan ini, kemudian kesiapan sekolah-sekolah dalam rangka menjadi subyek dalam kebijakan ini, serta ingin melihat kondisi kinerja guru dan motivasi siswa setelah diterapkannya

kebijakan ini, yang terakhir juga melihat respon masyarakat atas output yang dirasakan dari kebijakan ini.

1.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah evaluasi kebijakkan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Lampung Barat melalui empat aspek yang dievaluasi yaitu :

- 1.2.1 Evaluasi konteks ; (1) Dasar kebijakan, (2) Tujuan kebijakan, (3) Penyusunan kebijakan,
- 1.2.2 Evaluasi input ; (1) Kesiapan anggaran daerah, (2) Kesiapan SDM sekolah, (3) Respon masyarakat.
- 1.2.3 Evaluasi proses ; (1) Penyaluran dana, (2) Pelaksanaan di sekolah, (3) Kendala pelaksanaan
- 1.2.4 Evaluasi produk ; (1) Monitoring, (2) Motivasi Guru, (3) Motivasi Siswa (4) APK SMA/SMK Kabupaten Lampung Barat

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan pada latar belakang penelitian pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

- 1.3.1 Evaluasi kontek ; (1)Bagaimanakah dasar kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan, (2) Bagaimanakah tujuan dari kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan, (3) Bagaimanakah penyusunan kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan dilakukan

- 1.3.2 Evaluasi input ; (1) Bagaimanakah kesiapan anggaran daerah dalam kebijakan ini, (2) Bagaimana kesiapan SDM di sekolah, serta (3) Bagaimana respon masyarakat dalam menyikapi kebijakan ini
- 1.3.3 Evaluasi proses ; (1) Bagaimana penyaluran dana dari pihak pemerintah daerah kepada pihak sekolah, (2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan ini di sekolah yang diteliti, (3) Bagaimana kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kebijakan ini di sekolah yang diteliti,
- 1.3.4 Evaluasi produk ; (1) Bagaimana monitoring yang dilakukan oleh pihak dinas pendidikan, (2) Bagaimana pengaruh kebijakan ini terhadap keluhan dan kepuasan guru yang berkaitan dengan motivasi, (3) Bagaimana motivasi siswa dalam bersekolah setelah diterapkannya kebijakan ini, (4) Bagaimana data APK SMA/SMK setelah diterapkannya kebijakan ini

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan evaluasi terhadap kebijakan dana bantuan penyelenggaraan dengan menggunakan model evaluasi CIPP, yaitu mendeskripsikan hasil evaluasi dalam empat dimensinya yaitu :

- 1.4.1 Untuk mengetahui dasar dari diterapkannya kebijakan ini, tujuan dilahirkannya kebijakan ini serta bagaimana proses penyusunan kebijakan ini dilakukan oleh pihak terkait
- 1.4.2 Untuk mengetahui kesiapan anggaran daerah, kesiapan SDM di sekolah dalam melaksanakan kebijakan ini, serta untuk mengetahui respon dan partisipasi masyarakat dalam penerapan kebijakan ini terutama pada jenjang SMK

- 1.4.3 Untuk mengetahui proses penyaluran dana dalam kebijakan ini, pelaksanaannya di sekolah yang menjadi situs penelitian, serta tentang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan ini
- 1.4.4 Untuk mengetahui bagaimana proses monitoring yang dilakukan dalam kebijakan ini, untuk mengetahui adakah pengaruh kebijakan ini terhadap motivasi guru dan siswa di sekolah, serta untuk mengetahui pengaruh jangka panjangnya terhadap angka partisipasi kasar masyarakat terhadap pendidikan terutama pada jenjang SMA/SMK

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, rinci, dan faktual, sehingga dapat memberikan kegunaan yang besar bagi peneliti sendiri dan orang lain. Adapun kegunaan dari penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1.5.1 Teoritis

Secara teoritis penelitian ini akan berguna untuk menambah referensi produk intelektual bagi perkembangan pendidikan terutama dalam ranah kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan dalam pendidikan, serta sebagai salah satu sumber bagi penelitian selanjutnya

1.5.2 Praktis

1.5.2.1 Bagi Sekolah

Sebagai masukan bagi sekolah yang bersangkutan dalam usahanya untuk meningkatkan mutu pelayanan pendidikan dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis

1.5.2.2 Bagi Siswa

Sebagai masukan bagi siswa untuk menumbuhkan motivasi siswa terhadap pentingnya mengenyam bangku sekolah sebagai wujud dari pemerataan pendidikan bagi semua anak Indonesia, karena pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar anak Indonesia yang tidak mampu dapat terus mengenyam bangku pendidikan

1.5.2.3 Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat

Memberikan rekomendasi bagi pemerintah tentang dampak dari kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan dari berbagai stakeholder yang merasakan kebijakan tersebut, sehingga di masa datang dapat terus memperbaiki dan meningkatkan kebijakan yang telah ada, dan dapat memberi masukan dalam rangka keberlanjutan kebijakan ini di masa datang.

1.6 Definisi Istilah

1.6.1 Evaluasi adalah merupakan proses memahami, memberi arti, mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan

1.6.2 Evaluasi Model CIPP adalah salah satu model evaluasi yang sering digunakan untuk mengevaluasi program atau kebijakan dengan empat aspek yang dievaluasi yaitu konteks, input, proses, dan produk

1.6.3 Evaluasi konteks adalah evaluasi untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan? evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program atau kebijakan

- 1.6.4 Evaluasi input, evaluasi ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan? evaluasi masukan mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat dari proogram, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staf, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiffenes untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukan dalam memilih diantaranya rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwal pekerjaan, menilai rencana-rencana aktifitas, dan penganggaran.
- 1.6.5 Evaluasi proses, berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan? evaluasi ini mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membantu staf program melaksanakan aktifitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikan manfaat.
- 1.6.6 Evaluasi Produk, diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: apakah program berjalan dengan baik? evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.
- 1.6.7 Kebijakan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah biaya Pemerintah Daerah yang diberikan secara

langsung (belanja langsung) untuk Satuan Pendidikan Negeri dan secara hibah untuk satuan pendidikan swasta

1.6.8 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sekabupaten Lampung Barat adalah pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan kemampuan siswa untuk melaksanakan jenis pekerjaan tertentu yang berada dalam lingkup Kabupaten Lampung Barat

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR

Pada bab ini membahas tentang teori manajemen pendidikan dan teori kebijakan pendidikan yang meliputi tahap formulasi hingga monitoring kebijakan oleh William N. Dunn, Hough, Tilaar, serta pakar kebijakan lainnya sebagai grand teori dalam penelitian ini. Kemudian digunakan juga beberapa teori pendukung lainnya seperti desentralisasi kebijakan, analisis dampak kebijakan, dan penulis menyajikan kerangka berfikir.

2.1 Manajemen Pendidikan

Pada konsep manajemen pendidikan ini, disajikan pengertian manajemen pendidikan dan fungsi manajemen pendidikan

2.1.1 Pengertian Manajemen Pendidikan

Pengertian manajemen pendidikan menurut Hussaini (2009:12) adalah sebagai seni dan ilmu mengelola sumberdaya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian lain seperti yang ditegaskan oleh Arikunto (2009:5) adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Dari pengertian tersebut sudah jelas bahwa

kegiatan pengelolaan itu menunjukkan adanya usaha dan kerjasama yang dilakukan sekelompok manusia yang tergabung dalam sebuah organisasi yang terlibat dalam kegiatan pendidikan yang sebelumnya sudah ditetapkan terlebih dahulu.

2.1.2 Fungsi Manajemen Pendidikan

1) Perencanaan

Perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan dimasa yang akan datang yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Hussaini (2009:106) perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa yang akan datang dengan tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang di inginkan, urutan kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas-batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian. Definisi lain dari perencanaan adalah hubungan antara apa yang ada sekarang (*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*what should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program, dan alokasi sumber. Perencanaan ini menyangkut apa yang akan dilaksanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, dimana, dan bagaimana pelaksanaannya. Perencanaan ini penting dilakukan karena dapat dijadikan kerangka kerja, bisa menentukan proses yang palingh efektif dan efisien untuk mencapai tujuan, langkah, biaya, dan waktu yang akan dilakukan akan terukur.

Hussaini (2009:12) dalam bukunya menyimpulkan bahwa prinsip perencanaan agar perencanaan menghasilkan rencana yang baik, konsisten, dan realistis maka

kegiatan perencanaan perlu memperhatikan: (1) keadaan sekarang/tidak memulai dari nol tapi sumber data sudah ada; (2) keberhasilan dan faktor-faktor kritis keberhasilan; (3) kegagalan masa lampau; (4) potensi, tantangan, dan kendala yang ada; (5) kemampuan merubah kelemahan menjadi kekuatan, ancaman menjadi peluang/ analisis SWOT; (6) mengikutsertakan pihak-pihak terkait; (7) memperhatikan komitmen dan mengkoordinasikan pihak-pihak terkait; (8) mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi, demokratis, transparan, realistis, legalistik, dan praktis; (9) jika memungkinkan, mengujicobakan kelayakan perencanaan.

2) Pengorganisasian

Pengorganisasian diartikan Arikunto (2009:10) sebagai usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengatur, meyatukan, mensesuaikan, mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan, dan untuk mewujudkan kerjasama antar manusia. Pengorganisasian merupakan penyatuan dan penghimpunan sumber manusia dan sumber lain dalam sebuah organisasi. Manfaat pengorganisasian yaitu : (1) antara bidang yang satu dengan yang lain dapat diketahui batas dan bagaimana dapat melakukan kerja sama; (2) dengan penugasan yang jelas terhadap orang-orang, masing-masing mengetahui wewenang dan kewajibannya; (3) dengan digambarkannya unit-unit dalam sebuah struktur organisasi dapat diketahui hubungan vertikal dan horizontal.

3) Pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (actuating) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan

pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap pelaksana dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya.

4) Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan (*controlling*) merupakan fungsi manajemen yang tidak kalah pentingnya dalam suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui kelancaran kerja dalam mencapai tujuan dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dan penyelewengan. Kepengawasan sering disebut kontrol, penilaian, monitoring, pengendalian dan supervisi. Semua fungsi lain tidak akan efektif tanpa disertai fungsi pengawasan. Muljani dalam Arikunto (2009:14) mengemukakan definisi pengawasan disebut sebagai kontrol yang bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas kegiatan kerja yang sudah dilaksanakan dan tingkat efisiensi penggunaan komponen pendidikan dan komponen lainnya yang menyertai dalam proses pendidikan. Pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai. Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya.

2.2 Konsep Kebijakan Pendidikan

Pada teori kebijakan pendidikan, disajikan beberapa konsep seperti: pengertian kebijakan pendidikan, fungsi dan jenjang kebijakan pendidikan, pendekatan dan model kebijakan, tahapan kebijakan pendidikan, desentralisasi kebijakan pendidikan.

2.2.1 Pengertian Kebijakan Pendidikan

Kebijakan sering kali disamakan dengan istilah politik, program, keputusan, undang-undang, aturan, ketentuan-ketentuan, kesepakatan dan rencana strategis. Beberapa pakar telah menegaskan pengertian kebijakan pendidikan, kedua kata dari kebijakan dan pendidikan mempunyai arti yang luas dan beragam, sehingga perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dari kedua istilah tersebut.

Dunn (2000:132) menyatakan bahwa kebijakan publik (public policy) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Menurut Monahan dan Hengst dalam Syafaruddin

(2008:75) kebijakan (policy) secara etimology diturunkan dari bahasa Yunani, yaitu polis yang artinya kota (city). Kebijakan mengacu pada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Kegiatan ini berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Sedangkan menurut Abidin dalam (2006:17) kebijakan adalah keputusan pemerintah yang bersifat umum dan berlaku untuk seluruh anggota masyarakat. Definisi lain menurut Gamage dan Pang dalam Syafaruddin (2008:75), kebijakan adalah terdiri dari pernyataan tentang sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran tersebut sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program. Abidin (2004:22) menyimpulkan bahwa kebijakan publik mengandung tiga konotasi yaitu, pemerintah, masyarakat, dan umum. Pemaknaan ini mencakup subjek, objek, dan lingkungan dari kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan publik adalah kebijakan pemerintah yang dengan kewenangannya dapat memaksa masyarakat untuk mematuhi.

Pendapat lain menurut Nichols dalam Syafaruddin (2008:76), kebijakan adalah suatu keputusan yang dipikirkan secara matang dan hati-hati oleh pengambilan keputusan puncak dan bukan kegiatan-kegiatan yang berulang dan rutin dan terprogram atau terkait dengan aturan-aturan keputusan.

Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa kebijakan berarti seperangkat tujuan-tujuan, prinsip-prinsip serta peraturan-peraturan yang membimbing suatu

organisasi, dengan demikian kebijakan mencakup keseluruhan petunjuk organisasi. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah hasil pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik berupa tujuan, prinsip, maupun aturan yang berkaitan dengan hal-hal strategis untuk mengarahkan para manajer dan personil dalam menentukan masa depan organisasi yang berimplikasi bagi kehidupan masyarakat. Artinya, keputusan strategis yang ditetapkan sebelumnya untuk menjadi patokan pelaksanaan manajemen kehidupan masyarakat luas.

Sedangkan kebijakan untuk pendidikan menurut Tilaar dan Riant Nugroho (2008 :112) adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dan dalam bentuk lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan bisa dicapai. Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140) menyimpulkan bahwa pengertian kebijakan pendidikan merupakan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan, dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tersebut.

Hough (1984:15) menyimpulkan bahwa kebijakan pendidikan dibagi dengan beberapa kategori, yaitu:

- 1) Kebijakan yang berkaitan dengan fungsi-fungsi sekolah dan perguruan tinggi
- 2) Kebijakan yang berkaitan dengan struktur, pembangunan dan tata kelola lembaga individu dan sistem secara keseluruhan atau sebagian dari itu

- 3) Kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan, perekrutan, pengawasan, promosi dan remunerasi seluruh staf
- 4) Kebijakan terakhir yang menghubungkan dengan ketentuan dan alokasi sumber daya, keuangan dan penyediaan dan pemeliharaan bangunan dan peralatan.

Aspek yang perlu ada dan harus dilakukan dalam menentukan kebijakan adalah membuat perencanaan, karna secara universal sebuah perencanaan dapat diartikan sebagai suatu desain masa depan yang diinginkan dengan cara yang efektif untuk memecahkan. Perencanaan adalah suatu proses penentuan tujuan-tujuan dengan memiliki cara cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan lain sebelum mengambil langkah. Hal hal yang perlu diperhatikan para penentu kebijakan adalah proses perencanaan.

Adapun tahap tahap proses perencanaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan dan pengelolaan data. Pengumpulan dan pengelolaan data diperlukan karena merupakan titik bagi penentu kebijakan. Oleh sebab itu, pengumpulan dan pengelolaan data harus jelas dan akurat. Semua data yang terdapat dalam sistem pendidikan harus dapat dikumpulkan baik secara kualitatif maupun kuantitatif
- 2) Diagnosa. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah kemudian di diagnosa, dengan mengadakan diagnosa berarti meneliti dan meninjau kembali segala usaha dan hasil pendidikan yang ada termasuk rencana yang sudah disusun rapi belum dilaksanakan. Perumusan kebijakan dalam

manajemen dikenal tiga kata penting: (1) decision (keputusan). (2) policy (kebijakan), (3) strategy (berupa alternatif langkah yang harus diambil)

- 3) Perkiraan kebutuhan masa depan berdasarkan kebijakan yang telah digariskan dan disahkan, perumpamaan selanjutnya harus menjabarkan kebijakan-kebijakan itu ke dalam kebutuhan masa depan yang sah dan ada. Kemudian perlu dibuat perkiraan kebutuhan yang dapat menopang terhadap segala persoalan yang ada.
- 4) Perhitungan biasa. Langkah selanjutnya ialah penghitungan biaya untuk semua kebutuhan yang telah diinventarisasi pada tiap tahun dan yang akan datang yang sudah dirumuskan sebelumnya;
- 5) Penetapan sasaran. Pada waktu menganalisis data untuk tujuan (sasaran) perencanaan pendidikan perlu juga mengetahui sumber sumber dana bagi pembangunan pendidikan, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat, badan swasta ataupun yang berasal dari luar negeri. Kemudian berdasarkan kemampuan yang ada di alokasikan dana untuk setiap sektor dan sub sektor
- 6) Perumusan rencana tujuan,
- 7) Implementasi rencana. Suatu rencana pendidikan mulai dilaksanakan bila masing masing proyek sudah disahkan untuk di implementasikan disini terjadi proses pengelolaan dalam usaha pendidikan
- 8) Evaluasi semua kebijakan dilaksanakan, maka penilaian tentang kemajuan atau perkembangan dalam penemuan pengembangan pengembangan dalam pelaksanaan rencana segera dilakukan. Walaupun penilaian merupakan satu kegiatan yang terus menerus dan bersama dengan waktu

pelaksanaan rencana tersebut, tapi penyajian laporan dilakukan pada waktu waktu tertentu, misalnya laporan tahunan, laporan kwartal, laporan bulanan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk evaluasi.

Saat dilakukan tahapan tahapan dalam perencanaan tersebut, maka kebijakan dapat diambil berdasarkan rencana yang telah diatur sedemikian rupa, agar dalam pengambilan kebijakan selalu terhindar dari kesalahan yang mengacu pada merosotnya kualitas pendidikan.

2.2.2 Fungsi dan Jenjang Kebijakan

Menurut Thompson dalam Syafaruddin (2008:77) kebijakan diperoleh melalui suatu proses pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan (policy making) adalah terlihat sebagai sejumlah proses dari semua bagian dan perhubungan kepada sistem sosial dalam membuat sasaran sistem. Proses pembuatan keputusan memperhatikan faktor lingkungan eksternal, input (masukan), proses (transformasi), output (keluaran) dan feedback (umpan balik) dari lingkungan kepada pembuat kebijakan.

Pongtuluran dalam Syafaruddin (2008:7) menyimpulkan kebijakan dipandang sebagai: (1) pedoman untuk bertindak, (2) pembatas perilaku, (3) bantuan bagi pengambil keputusan. Keberadaan kebijakan penting dalam suatu organisasi apapun karena dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku dalam berbagai aktivitas strategis untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Pongtuluran dalam Syafaruddin (2008:78) kebijakan adalah produk pengambilan keputusan strategis maka jenjang kebijakan dihubungkan dengan jenjang manajemen, yaitu:

- 1) Manajemen Puncak. Kebijakan yang disusun oleh jenjang ini berasal dari hampir semua sumber. Kebijakan ini mempunyai kepentingan yang tinggi dan kekhususan yang rendah. Kebijakan jenjang ini cenderung bersifat umum dan utamanya memiliki wawasan untuk eksternal yang berhubungan dengan fungsi keuangan, hubungan masyarakat dan penelitian. Manajemen puncak biasanya mempunyai kaitan erat terhadap keperluan jangka panjang dan jangka menengah.
- 2) Manajemen Menengah. Kebijakan jenjang ini cenderung mengikuti perintah atau referensi dari manajemen puncak atau manajemen menengah. Sumbernya dapat berasal dari budaya, sejarah atau pendahulunya. Kebijakan manajemen menengah biasanya lebih penting daripada kebijakan manajemen operasi, tapi kurang penting daripada manajemen puncak. Manajemen menengah lebih memperhatikan jangka waktu menengah dan pendek dengan tetap sesuai dengan kebijakan jangka panjang;
- 3) Manajemen Operasi. Kebijakan yang ditetapkan pada jenjang ini biasanya berlaku untuk kegiatan operasi dan bidang fungsi semua organisasi. Kebijakan operasi berasal dari jenjang bawah, sebab itu kurang tegas dan penting, tetapi lebih khusus daripada kebijakan yang lebih tinggi.

Karakteristik etika kebijakan pendidikan menurut Yoyon (2011:49) dalam konteks manajemen pendidikan antara lain:

- 1) Kebijakan pendidikan diperoleh melalui penemuan empiris dengan menggunakan prosedur dan teknik ilmiah;

- 2) Kriteria, alat dan prosedur yang dipergunakan dalam menganalisis kebijakan pendidikan bersifat relatif untuk setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan;
- 3) Masing-masing implementasi kebijakan pendidikan harus menghasilkan produk dan dampak yang bernilai, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik;
- 4) Nilai baik pada setiap situasi implementasi kebijakan pendidikan terletak pada proses aktif;
- 5) Sikap yang baik adalah yakin bahwa kondisi implementasi kebijakan pendidikan pada suatu saat akan bernilai baik dan buruk, tergantung apa yang telah dan sedang diusahakan.

2.2.3 Pendekatan dan Model Kebijakan Pendidikan

Linblom dalam Syafaruddin (2008:79) mengemukakan tiga pendekatan yang sering digunakan, yaitu:

- 1) Pendekatan analisis, yaitu suatu proses membuat kebijakan yang didasarkan pada pengambilan keputusan tentang masalah dan beberapa pilihan kebijakan alternatif atas dasar hasil analisis;
- 2) Pendekatan politik, yaitu pembuatan kebijakan atas dasar pengambilan keputusan tentang pilihan kebijakan dengan pengaruh kekuasaan, tekanan dan kendali pihak lain.
- 3) Pendekatan analisis dan politik, pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada pendekatan analisis dan pendekatan politik.

Dunn (2000:232) mendefinisikan model kebijakan (policy models) sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan tertentu. Model kebijakan bermanfaat untuk menyederhanakan sistem masalah (messes) dengan mampu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para ahli kebijakan. Manfaat lain adalah untuk membantu membedakan hal-hal yang esensial, mempertegas hubungan antara faktor dan variabel penting, dan mampu menjelaskan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan kebijakan.

Dunn menyimpulkan bahwa ada dua bentuk utama model kebijakan, adalah:

- 1) Model deskriptif, menjelaskan dan/atau mendeskripsikan sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan.
- 2) Model normatif, menjelaskan dan/atau memprediksi tetapi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian beberapa utilitas (nilai).

Menurut Dror dan Islamy dalam Syafaruddin(2008:80) ada tujuh model kebijakan, yaitu:

- 1) Model rasional murni, yaitu model yang mengembangkan kebijakan secara rasional;
- 2) Model ekonomi, yaitu model yang mengembangkan kebijakan berdasarkan faktor ekonomi;
- 3) Model keputusan berurutan, yaitu kebijakan yang mendasari pengambilan keputusan atas dasar beberapa kebijakan alternatif yang diperoleh dari eksperimen.

- 4) Model inkremental, yaitu model yang menggunakan pendekatan pengambilan kebijakan atas dasar perubahan sedikit demi sedikit.
- 5) Model memuaskan, yaitu model yang mendasarkan keputusan atas dasar kebijakan alternatif yang paling memuaskan tanpa menilai kritis alternatif lain.
- 6) Model ekstrasional, yaitu model yang mendasarkan pengambilan kebijakan atas dasar pertimbangan sangat rasional
- 7) Model optimal, yaitu model yang mendasarkan pengambilan keputusan atas dasar gabungan berbagai metode secara terpadu untuk menghasilkan kebijakan yang optimal dan dapat diterima oleh semua pihak. Berdasarkan pernyataan di atas, model kebijakan adalah suatu bentuk kebijakan yang diambil atas beberapa pertimbangan, baik dari pertimbangan, tujuan, strategi maupun keperluan lingkungan eksternal.

2.2.4 Tahapan Kebijakan Pendidikan

Kebijakan dalam pelaksanaannya terdiri dari beberapa tahapan. Hough (1984:17) menyimpulkan bahwa beberapa tahapan dalam proses kebijakan, yaitu:

- 1) Adanya masalah dan identifikasi masalah

Keberadaan masalah yang memerlukan perhatian pemerintah

- 2) Perumusan kebijakan dan otorisasi

Perumusan tentu saja pilihan tindakan, upaya untuk mencapai kesepakatan, otorisasi formal, strategi tertentu melalui perundang-undangan;

3) Pelaksanaan

Interpretasi kebijakan dan penerapannya untuk kasus-kasus tertentu, pengembangan program;

4) Penghentian atau perubahan

Apabila terminasi masalah telah dipecahkan, kebijakan itu tidak berhasil atau hasil yang dianggap tidak diinginkan, alternatif perubahan besar pada arah yang akan dihasilkan dari umpan balik, atau penggantian dengan kebijakan baru.

Dunn (2000:107) menegaskan bahwa masalah kebijakan (policy problem) adalah nilai, kebutuhan, kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi, untuk kemudian diperbaiki atau dicapai melalui tindakan publik. Formulasi kebijakan dalam konteks manajemen adalah perencanaan dan implementasi kebijakan adalah tindakan (action). Dengan begitu, ketika kebijakan dibuat, maka tugas penting yang harus dilakukan adalah mengorganisasikan dan melaksanakan kepemimpinan untuk mengarahkan pelaksanaan dan melakukan pengendalian (controlling) serta monitoring pelaksanaan kebijakan tersebut.

Hough (1984:25) juga menyimpulkan bahwa suksesnya pelaksanaan kebijakan pendidikan pada dasarnya tergantung pada beberapa faktor. Faktor-faktor itu dirinci sebagai berikut: (1) adanya desain kebijakan; (2) adanya strategi implementasi; (3) adanya komitmen dan kapasitas sistem birokrasi termasuk kapasitas sumber daya politik dan saran yang tersedia; (4) adanya faktor lingkungan.

Tahap pertama dalam formulasi kebijakan dalam proses pembuatan kebijakan digambarkan oleh Dunn (2000:24) sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tahap Formulasi Kebijakan

Fase	Karakteristik	Ilustrasi
Penyusunan agenda	Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah tidak disentuh sama sekali sementara yang lainnya ditunda untuk waktu lama.	Legislator negara dan kosponsornya menyiapkan rancangan undang-undang dan mengirimkan ke komisi kesehatan dan kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di komite dan tidak dipilih.
Formulasi kebijakan	Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan pengadilan dan tindakan legislative.	Peradilan negara bagian mempertimbangan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung biasa terhadap perempuan dan minoritas.
Adopsi kebijakan	Alternatif kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dan mayoritas legislatif, consensus diantara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan.	Dalam keputusan MA pada kasus Roe V Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.
Implementasi kebijakan	Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.	Bagian keuangan kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak memiliki status pajak.
Penilaian kebijakan	Unit unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan badan eksekutif, legislatif dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.	Kantor akuntansi publik memantau program program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan untuk menentukan luasnya penyimpangan/korupsi.

Sumber : William Dunn, 2000 : 24

1) Penyusunan Agenda

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain.

Dalam agenda setting juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Masalah kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat diantara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Menurut William Dunn, isu kebijakan merupakan produk atau fungsi dari adanya perdebatan baik tentang rumusan, rincian, penjelasan maupun penilaian atas suatu masalah tertentu. Namun tidak semua isu bisa masuk menjadi suatu agenda kebijakan. Penyusunan agenda kebijakan seyogianya dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder. Sebuah kebijakan tidak boleh mengabaikan tingkat urgensi, esensi, dan stakeholder.

2) Formulasi kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari

berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

3) Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah. Namun warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah yang sah. Mendukung. Dukungan untuk rezim cenderung berdufusi – cadangan dari sikap baik dan niat baik terhadap tindakan pemerintah yang membantu anggota montolerir pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol-simbol tertentu. Di mana melalui proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah.

4) Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan

Kegagalan terbesar dalam implementasi kebijakan pendidikan adalah menempatkannya sebagai tujuan. Sebagai sebuah cara, kebijakan diuraikan dalam bentuk program dan kegiatan;

5) Penilaian/Evaluasi kebijakan

Secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu

kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

Sedangkan menurut Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008:81) ada tiga proses kebijakan evaluasi yaitu: formulasi, implementasi, dan evaluasi. ketiga proses tersebut diuraikan agar secara holistik makna kebijakan sebagai suatu proses manajemen dapat dipahami dengan benar.

2.2.4.1 Perumusan Kebijakan

Perumusan kebijakan tidak hanya berisi cetusan pikiran atau pendapat para pimpinan yang mewakili anggota, tetapi juga berisi pendapat masyarakat. Hal itu disebabkan proses pembuatan kebijakan pada esensinya tidak pernah bebas nilai (value free) sehingga berbagai kepentingan akan selalau mempengaruhi terhadap proses pembuatan kebijakan.

Beberapa pakar menjelaskan bahwa proses perumusan kebijakan selalu dan harus memperhatikan beberapa karakteristik penting agar dapat mencapai sasaran kebijakan yang dituangkan dalam tahapan implementasi kebijakan. Ada empat elemen lingkungan yang perlu diperhatikan dalam proses perumusan kebijakan publik, yaitu: (1) economic, (2) cultural, (3) demographic, (4) political elements. Keempat elemen penting yang dijelaskan berkaitan dengan perlunya analisis derajat urgensi dan relevansinya berdasarkan interest dan kebutuhan masyarakat.

Syafaruddin(2008:83) menyimpulkan bahwa formulasi kebijakan mengandung beberapa isi penting yang dijadikan sebagai pedoman tindakan sesuai yang direncanakan. Isinya mencakup:

- 1) Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan
- 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- 3) Derajat perubahan yang akan diinginkan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya yang dikerahkan

2.2.4.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengaruh pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan atau keputusan kebijakan. Kebijakan tersebut biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.

Van Horn dan Van Meter dalam Alifuddin (2011:12) menyimpulkan proses implementasi sebagai tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun pihak swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Lineberry dalam Yunus (2009) menyimpulkan bahwa proses implementasi setidaknya memiliki elemen-elemen berikut: (1) pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana, (2) penjabaran tujuan ke dalam berbagai aturan pelaksana (standard operating procedures/SOP), (3) koordinasi berbagai sumber dan

pengeluaran pada kelompok sasaran, pembagian tugas di dalam dan di antara dinas-dinas dan badan pelaksana, dan (4) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Proses implementasi kebijakan publik adalah sebuah tahapan yang dilakukan setelah kebijakan diadopsi (adopted) atau disahkan oleh yang memiliki otoritas untuk kebijakan yang bersangkutan. Dengan demikian maka implementasi kebijakan seringkali dikaitkan dengan proses administratif di mana ditemukan banyak proses dan aktifitas organisasional dalam proses dan pendekatan yang dilakukannya. Sebalainya keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan tujuan kebijakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara yang dilaksanakan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Pernyataan Putt dan Springer dalam Syafaruddin (2008:87) bahwa implementasi kebijakan memerlukan banyak keputusan dan tindakan seperti: menjamin dan menguatkan berbagai arahan, peraturan, mengeluarkan, dan membuat penemuan, rekrutmen dan pembinaan personil, menghargai dan membuat kontrak, menciptakan unit organisasi baru seperti staf, membuat anggaran yang diperlukan, dan menciptakan analisis laporan.

Implementasi kebijakan dijelaskan oleh Stewar dan Lester dalam Alifuddin (2011:14) bahwa ada dua pendekatan untuk memahami implementasi secara sederhana, yakni: 1) pendekatan top-down, pendekatan ini adalah pendekatan yang dilakukan secara tersentralisasi, pendekatan ini dimulai dan diputuskan oleh aktor di tingkat pusat, pendekatan ini bertitik tolak dari perspektif bahwa keputusan/kebijakan telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan dan harus dilaksanakan oleh birokrat-birokrat atau administrator-administrator pada level

bawahnya; 2) pendekatan bottom-up, pendekatan ini adalah pendekatan yang menyoroti pelaksanaan kebijakan yang terformulasi dan inisiasi warga masyarakat setempat melalui argumentasi bahwa masalah dan persoalan yang terjadi di level daerah hanya dapat dimengerti secara baik oleh warga setempat.

Kegiatan awal yang mendahului implementasi kebijakan pendidikan menurut Senduk (2008:151) meliputi langkah-langkah berikut:

1. Sosialisasi, tahap ini merupakan proses yang mana aktor/pelaksana mempelajari nilai nilai dan norma norma budaya organisasi. Sebelum kebijakan diimplementasikan, dinas melakukan sosialisasi kebijakan kepada jajarannya dengan maksud untuk memberikan pemahaman. Cara cara, strategi untuk memudahkan para pelaksana kebijakan di lapangan dengan tujuan agar tidak terjadi persepsi yang beragam antara pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan.
2. Bimbingan dan arahan, melalui bimbingan dan arahan sebagai bentuk kegiatan fasilitasi kebijakan pendidikan yang tepat, jelas dan sistematis para pelaksana akan dengan mudah menyesuaikan dan melaksanakan suatu kebijakan tersebut.
3. Pelatihan tenaga pelaksana, untuk kelancaran operasional di lapangan, maka perlu pelatihan bagi pelaksana untuk memotivasi dan melengkapi keterampilan/kemampuan.

2.2.4.3 Monitoring Kebijakan

Suatu kebijakan tidak bisa dibiarkan begitu saja setelah diimplementasikan. Begitu pelaksanaan kebijakan berlangsung selanjutnya perlu diperiksa. Sebagai

proses manajemen, pengawasan adalah keharusan, atau diperlukan sebagai proses pemantauan. Monitoring kebijakan dilakukan sebagai proses untuk mengetahui sejauh mana keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait (stakeholders). Dengan kata lain sejauh mana tujuan kebijakan itu tercapai. Di sisi lain, monitoring dipergunakan untuk mengetahui kesenjangan antara harapan dan tujuan dengan kenyataan yang dicapai dan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan para pelaku kebijakan, tapi utamanya adalah supaya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan kebijakan dapat diperbaiki sehingga pencapaian tujuan lebih maksimal.

Dalam monitoring atau pemantauan mencakup pengumpulan data secara sistematis dan berkelanjutan atau aktivitas program. Menurut Syafaruddin (2008:94) informasi itu mencakup dua hal utama, yaitu:

- 1) Masukan, adalah sumber daya yang dibutuhkan oleh pelaksanaan aktivitas program. Anggaran biaya dan waktu merupakan masukan dasar pelayanan sebagai pengukuran efisiensi.
- 2) Hasil, adalah produk dari aktivitas program. Sejumlah kasus proses, jumlah hambatan, jumlah hambatan pernyataan kalimat, dan keempat adalah contoh ukuran hasil pelayanan sebagai indikator efektifitas.

Monitoring atau pemantauan kebijakan dilakukan untuk memperoleh umpan balik dari pelaksanaan kebijakan dan untuk memperoleh informasi agar dapat secepatnya mencegah faktor faktor yang menghambat kelancaran proses implementasi kebijakan pendidikan yang sedang dilaksanakan. Melalui kegiatan pemantauan ini, dinas pendidikan akan memperoleh informasi tentang kebaikan

dan kelemahan, kelebihan dan kekurangan, kendala kendala dan masalah yang muncul.

Ada empat fungsi pemantauan atau monitoring menurut Dunn (2000:150), yaitu:

- 1) Kepatuhan, (compliance). Untuk menentukan apakah tindakan dari para administrator program, staf, dan pelaku lain sesuai dengan standar dan prosedur yang dibuat oleh para legislator, instansi pemerintah, dan lembaga profesional.
- 2) Pemeriksaan (auditing). Untuk menentukan apakah sumberdaya dan pelayanan yang dimaksudkan untuk kelompok sasaran maupun konsumen tertentu memang telah sampai kepada mereka.
- 3) Akuntansi. Monitoring menghasilkan informasi yang bermanfaat untuk melakukan akuntansi akan perubahan social dan ekonomi yang terjadi setelah dilaksanakannya sejumlah kebijakan dari waktu ke waktu,
- 4) Eksplansi. Menghimpun informasi yang dapat menjelaskan mengapa hasil hasil kebijakan publik dan program berbeda.

Yoyon (2011:55) menyimpulkan bahwa untuk menilai layak atau tidaknya suatu kebijakan dilihat dari ukuran ukuran sebagai berikut:

- 1) Dari aspek formulasi kebijakan pendidikan, yaitu: (1) filsafat pendidikan yang dipakai dasar penyelenggaraan pendidikan; (2) teori dan ilmu yang dipakai rujukan untuk setiap komponen pendidikan; (3) sistem nilai yang dijadikan dalam pengembangan asumsi-asumsi yang melandasi praktik-praktik pendidikan

- 2) Pada tatanan implementasi kebijakan: (1) prioritas permasalahan pada tiap aspek pendidikan; (2) pendekatan dan prosedur implementasi yang digunakan; (3) peran pelaku kebijakan; (4) setting lingkungan yang memungkinkan berpengaruh pada seluruh aspek kebijakan
- 3) Pada tatanan evaluasi kebijakan pendidikan, terutama pada aspek: (1) dampak terhadap efisiensi penggunaan sumber daya; (2) kemanjurannya terhadap pencapaian target; (3) akuntabilitas para pelaku kebijakan.

Dunn (2000:513) menegaskan bahwa dalam memantau kebijakan ada dua jenis akibat yaitu keluaran (outputs) dan dampak (impacts). Keluaran kebijakan diantaranya adalah barang, sumber daya, dan layanan yang diterima oleh sekelompok penerima (beneficiaries). Dampak kebijakan merupakan perubahan nyata pada tingkah laku atau sikap yang dihasilkan oleh keluaran kebijakan tersebut.

2.2.5 Desentralisasi Kebijakan

Desentralisasi menurut United Nations dalam Yoyon (2011:66) menjelaskan bahwa desentralisasi itu proses kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah digagas dan diawali dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 dan disempurnakan UU No. 32 Tahun 2004. Pelimpahan wewenang ini berlaku pada semua bidang termasuk dalam bidang pendidikan. Adanya pelimpahan wewenang ini, semakin membantu dan memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk seluas-luasnya mengelola pendidikan sebaik mungkin.

Kewenangan dan alokasi dana untuk pendidikan disebutkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 49, yang berbunyi: dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan minimal 20 % anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Realisasi ini tentunya mengaruh pada tanggung jawab pemerintah daerah yang semakin meningkat dan luas termasuk dlam manajemen pendidikan. Pemerintah daerah dengan UU ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuannya dalam berbagai tahap pembangunan pendidikan sejak mulai tahap perumusan kebijakan. Perencanaan, pelaksanaan sampai pada tingkat monitoring di daerah masing masing sejalan dengan kebijakan pendidikan nasional.

Pengaturan otonomi dalam pendidikan secara tegas dinyatakan dalam PP No. 25 Tahun 2000 yang mengatur tentang pembagian kewenangan pemerintah pusat dan provinsi. Semua urusan pendidikan diluar kewenangan pemerintah pusat dan provinsi tersebut sepenuhnya menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal 50 yang berbunyi: Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.

Adanya desentralisasi dalam penyelenggaraan pendidikan daerah bertujuan agar pengelolaan dan penyelenggaran pendidikan lebih sesuai dengan konteks kebutuhan daerah yang bermutu adil. Desentralisasi yang berimplikasi pada otonomi pendidikan ini dibangun atas filodofi bahwa masyarakat di setiap daerah merupakan pondasi yang kuat dalam pengembangan kualitas sumber daya

manusia secara nasional. Ini berarti bahwa orang-orang daerahlah yang paling mengetahui permasalahan dan kebutuhan di daerahnya sendiri. Desentralisasi dalam pendidikan akan menghasilkan output yang cerdas secara nasional dan arif dalam tingkat lokal. Output yang cerdas dan arif ini secara umum akan membentuk tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik, berhasil dan produktif sesuai dengan konteks di mana ia berada dan melalui pendidikan yang mengerti lokalitas (sesuai dengan kebutuhan daerah).

Dalam melaksanakan otonomi dalam bidang pendidikan memang tidak mudah, ada permasalahan yang harus dihadapi. Secara sederhana, permasalahan yang harus dihadapi dalam pembangunan pendidikan antara lain: (1) peningkatan mutu pendidikan; (2) pemerataan pendidikan; (3) efisiensi manajemen; (4) peran serta masyarakat; (5) akuntabilitas.

Yoyon (2011:79) menegaskan bahwa Ada tiga persoalan mendasar yang patut diantisipasi dalam desentralisasi pendidikan, yaitu: apakah pemberian otonomi kepada daerah akan menjamin setiap warga memperoleh haknya dalam pendidikan? Dan apakah dengan pemberian wewenang menyelenggarakan pendidikan kepada daerah dapat menjamin peran serta masyarakat akan meningkat? Dan apakah penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan di daerah dapat mencapai hasil hasil pendidikan yang bermutu?

Pada dasarnya desentralisasi dalam pendidikan adalah kesempatan emas bagi pemerintah daerah untuk membangun dan mengatur pendidikan sebaik da sesuai kebutuhan yang ada di daerah, disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan yang ada di daerah. Pemerintah daerah sebagai pengambil kebijakan umum pendidikan

harus memulainya dari adanya political will yang kuat guna menjamin pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh anak dan semua lapisan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu sebagai hak mereka. Peran ini bisa dilakukan mengenai kebijakan umum, pelayanan teknis dan monitor program secara regular akan kebutuhan masyarakat.

Misi utama desentralisasi dalam manajemen pendidikan ialah untuk menumbuh kembangkan kemandirian masyarakat daerah dalam mengelola pendidikan. Ini berarti bahwa tugas yang paling utama dalam desentralisasi manajemen pendidikan di daerah harus diprioritaskan pada upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Yoyon (2011:96) menyimpulkan bahwa desentralisasi dala bidang manajemen pendidikan berkenaan dengan aspek aspek diantaranya: (1) perundang undangan pendidikan; (2) struktur organisasi dan kelembagaan pendidikan; (3) pengembangan kurikulum pendidikan; (4) profesionalisasi tenaga kependidikan; (5) sarana da prasarana pendidikan; (6) pembiayaan pendidikan.

Oleh karena itu, para manajer pendidikan di daerah kabupaten/kota diharapkan mampu:

- 1) Meningkatkan partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk dapat berperan aktif dalam pembangunan di bidang pendidikan.
- 2) Membuat terobosan baru di bidang pendidikan agar bisa menciptakan sumber daya manusia yang handal.
- 3) Mengidentifikasi masalah masalah pendidikan di daerahnya secara khusus termasuk upaya menanganinya.

- 4) Melaksanakan UU No. 32 Tahun 2004 yang memberi kewenangan daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan yang tertuju pada kepentingan masyarakat.

Yoyon (2011:113) juga menegaskan bahwa ada empat kategori yang dapat dijadikan indikator dalam menentukan tingkat keberhasilan pendidikan yaitu: (1) dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi; (2) dapat tidaknya seseorang memperoleh pekerjaan; (3) besarnya penghasilan/gaji yang diterima; (4) sikap perilaku dalam konteks sosial, budaya, dan politik.

2.3 Pengertian dan Ruang Lingkup Pemerintahan Daerah

Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah daerah merupakan bagian integralnya. Dasar hukum dari adanya pemerintah daerah terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 18 ayat 1 UUD 1945, menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintah daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Kemudian mengenai pemerintah di daerah dinyatakan lebih rinci dengan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Melihat sangat luasnya wilayah negara serta luasnya persoalan yang ada, pada umumnya pemerintah daerah (local government) bertingkat-tingkat, yaitu pemerintah tingkat provinsi, pemerintah tingkat kabupaten, pemerintah tingkat

kotamadya, pemerintah tingkat kecamatan dan pemerintah tingkat desa atau tingkat kelurahan.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan demikian peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom yaitu untuk melakukan :

- 1) Desentralisasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewenangan pemerintah pusat menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Dekonsentrasi, yaitu menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan, dan
- 3) Tugas pembantuan, yaitu melaksanakan semua penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada

kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa melaksanakan tugas tertentu.

2.4 Gambaran Kebijakan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lampung Barat

Pendidikan adalah kebutuhan. Pendidikan adalah investasi bagi masa datang. Kesadaran masyarakat terhadap dunia pendidikan untuk saat ini semakin meningkat. Biaya sekolah yang meningkat tidak mengurangi semangat para orang tua untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Tidak ada pendidikan yang berkualitas dengan harga yang murah. Apalagi di abad ilmu pengetahuan saat ini, memiliki ilmu pengetahuan yang berkualitas memerlukan dana yang memadai. Sesuai dengan Hand Out dari Dinas Pendidikan Lampung Barat yang disampaikan oleh Drs. Nukman,MS,MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Lampung Barat dalam kesempatan sosialisasi kebijakan pemerataan akses pendidikan daerah di GSG pemkab setempat, menyatakan bahwa "Pendidikan murah dan mudah bagi rakyat artinya pendidikan tersebut diselenggarakan untuk rakyat dan mudah diikuti atau dijangkau untuk semua rakyat". Hal ini tentu menyiratkan suatu itikad dan political will yang baik dari pemerintah daerah kabupaten lampung barat melalui digulirkannya kebijakan ini.

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pendidikan murah dan terjangkau adalah pendidikan dimana semua lapisan masyarakat terutama masyarakat kurang mampu dapat melaksanakan kegiatan belajarnya dengan murah dan mudah yaitu mereka tidak harus membayar biaya-biaya yang dikelola

oleh sekolah, misalnya uang SPP/Komite, uang pengembangan, uang pendaftaran, dan uang buku atau dapat dikatakan tanpa dipungut biaya.

Untuk di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Barat termasuk pelopor dalam memberikan subsidi dana pendidikan kepada masyarakat ini sejak awal tahun 2009. Pelaksanakan kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 912/449.a/2009 tanggal 5 Januari 2009, yang diumumkan oleh Bupati Lampung Barat Mukhlis Basri, ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang sejak 2008 telah mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar. Atas peraturan pemerintah tersebut, Kabupaten Lampung Barat juga di bawah kepemimpinan Bupati Mukhlis Basri sejak 2009 juga konsisten menggulirkan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan di wilayah tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Lampung Barat Nukman, mengatakan melalui kebijakan Dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (BPP), selain mensukseskan penyelenggaraan pendidikan di tingkat TK, SD, SMP baik negeri maupun swasta serta satuan pendidikan dibawah naungan Kementerian Agama Yakni RA/MI/MTs. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menggulirkan kebijakan ini bagi semua jenjang pendidikan dengan rincian seperti yang dijelaskan dalam perbup tentang petunjuk teknis (juknis) bantuan dana BPP pada Bab II tentang mekanisme alokasi anggaran dana BPP pada tahun 2015/2016 :

- a. Rp. 240.000,- per siswa per tahun untuk SMA Negeri;
- b. Rp. 720.000,- per siswa per tahun untuk SMK Negeri;

- c. Rp. 60.000,- per siswa per tahun untuk SMP Negeri;
- d. Rp. 52.000,- per siswa per tahun untuk SD Negeri;
- e. Rp. 52.000,- per siswa per tahun untuk TK Negeri;
- f. Rp. 240.000,- Per siswa per tahun untuk SMA Swasta;
- g. Rp. 540.000,- per siswa per tahun untuk SMK Swasta;
- h. Rp. 150.000,- Per siswa per tahun untuk MA Negeri / Swasta;
- i. Rp. 80.000,- per siswa per tahun untuk SMP Swasta dan MTs Negeri/Swasta;
- j. Rp. 50.000,- per siswa per tahun untuk SD Swasta dan MI Negeri/Swasta;
- k. Rp. 50.000,- per siswa per tahun untuk Tk/Ra Swasta.

Dengan digulirkannya kebijakan ini , dilapangan animo masyarakat untuk menyekolahkan putra-putri ke di SMA/SMK Negeri di Lampung Barat meningkat, jika di tahun 2008 hanya mencapai 35,36% ditahun 2012 naik menjadi 69,25%. Sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat menggulirkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di tingkat SMA/SMK sederajat pada 2013 lalu, pemerintah kabupaten Lampung Barat juga konsisten mendukung program wajib belajar 12 tahun dengan mengalokasikan anggaran dari APBD yang dinamai biaya penyelenggaraan pendidikan (BPP). Pada tahun ajaran yang sedang berjalan saat ini Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mensubsidi anggaran bagi jenjang SMA (negeri dan swasta) sebesar Rp 240.000 / siswa /tahun, Rp.150.000/siswa/tahun bagi jenjang MA (negeri dan swasta) dan bagi jenjang SMK (negeri dan swasta) sebesar Rp 790.000 /siswa/tahun. Implikasi dari dikeluarkannya kebijakan ini adalah dibebaskannya biaya pendidikan bagi siswa

mulai jenjang SD hingga SMA/SMK, dan Bupati mengeluarkan instruksi untuk tidak memungut biaya operasional dari siswa dalam bentuk pungutan apapun bagi sekolah negeri terutama, dan Tim Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menangani ini terus mengawal pelaksanaan instruksi ini terutama bagi sekolah berstatus sekolah negeri.

Setidaknya ada dua dasar kuat yang melatarbelakangi program ini, yakni komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan amanat UUD 45 Pasal 31 serta UU No 20 Tahun 2003, Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 34 ayat 2 dan 3 yang berbunyi “Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada Jenjang Pendidikan Dasar tanpa memungut biaya”. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memberikan porsi yang cukup besar dari alokasi anggaran untuk peningkatan mutu pendidikan, utamanya perluasan dan pemerataan akses kesempatan belajar melalui kebijakan pendidikan gratis dalam penuntasan wajar dikdas 9 tahun sekaligus wajar pendidikan menengah 12 tahun.

Selain itu, latar belakang lain yang turut memperkuat gagasan ini yakni adanya fakta bahwa masih banyak anak usia sekolah terutama dari kalangan ekonomi lemah yang belum dapat mengenyam bangku sekolah ataupun yang terpaksa harus putus sekolah lantaran permasalahan klasik. Adapun dasar hukum yang melandasi Kebijakan ini adalah sebagai berikut :

- 1) UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2.
- 2) UU RI No. 22/1999 tentang pemerintah daerah.
- 3) UU RI No. 20/2003 tentang sistem pendidikan nasional.
- 4) PP No. 72/1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional.

- 5) Kepment Koordbid Kesra No. 06 /Kep/Menko/Kesra/X/1994 tentang koordinator pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesra dan Pengentasan Kemiskinan Nomor 07/Kep/Menko/Kesra/III/1999 tentang pedoman umum koordinasi pelaksanaan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar.
- 6) Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0306/U/1995 tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar.
- 7) Kebijakan Kepala Daerah tentang bantuan dana penyelenggaraan pendidikan guna penuntasan program pendidikan dasar dan menengah di kabupaten Lampung Barat

2.5 Evaluasi Program / Kebijakan

Wikipedia evaluasi (*Evaluation*) adalah proses penilaian. Dalam perusahaan , evaluasi dapat diartikan sebagai proses pengukuran, pengukuran tersebut akan digunakan sebagai analisis situasi program atau kebijakan berikutnya. Evaluasi berasal dari kata Evaluation yang diserap kedalam perbendaharaan istilah bahasa indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit menyesuaikan lafal indonesia menjadi “evaluasi”

Cross, (dalam Sukardi, 2012:1) menyatakan *Evaluation is a process which determines the extend to which objectives have been achieved.* Yang berarti bahwa evaluasi merupakan proses yang menentukan kondisi, dimana suatu tujuan telah dapat dicapai. Definisi ini menerangkan secara langsung hubungan evaluasi dengan tujuan suatu kegiatan yang mengukur derajat, dimana suatu tujuan dapat dicapai. Sebenarnya evaluasi juga merupakan proses memahami, memberi arti,

mendapatkan, dan mengkomunikasikan suatu informasi bagi keperluan pengambil keputusan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 57 ayat (1), mengatakan evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan.

Stufflebearn dalam Arikunto (2009 : 5), mengatakan bahwa evaluasi adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan. Sejalan dengan pendapat tersebut Tayibnapi (2008:4) mengatakan kelompok konsorsium evaluasi Stanford menolak definisi evaluasi yang menghakimi (*Judgmental definition of evaluation*). Karena menurut mereka bukanlah tugas evaluator menentukan apakah suatu program berguna atau tidak. Evaluator tidak dapat bertindak sebagai wasit terhadap orang lain. Maka definisi yang tidak menghakimi (*Nonjudgmental definition of evaluation*) tampaknya lebih dapat diterima.

Dari pengertian mengenai evaluasi diatas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis, pengenalan permasalahan dan pemberian solusi atas permasalahan yang ditemukan. Evaluasi kadang-kadang tidak dapat dilakukan dengan hanya menggunakan informasi yang dihasilkan sistem informasi pada organisasi instansi saja. Data dari luar instansi akan menjadi sangat penting untuk digunakan dalam melakukan analisis dan evaluasi. Dengan

demikian, evaluasi bukan ingin menghakimi apakah sebuah program berguna atau tidak.

Sukardi (2014:2) mengatakan pengertian evaluasi secara umum, yaitu suatu proses mencari data atau informasi tentang obyek atau subyek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap obyek atau subyek yang dilaksanakan untuk tujuan pengambilan keputusan terhadap obyek atau subyek tersebut. evaluasi dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu : (1) Evaluasi pembelajaran yang digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan tentang materi pembelajaran peserta didik, (2) evaluasi program untuk menentukan tingkat ketercapaian program terhadap tujuan yang telah ditetapkan, dan (3) evaluasi sistem yang kegunaannya utamanya untuk menentukan tingkat ketercapaian tujuan lembaga dan komitmen kepemimpinan para pengelolanya terhadap tujuan pokok dan fungsi lembaga tersebut.

Evaluasi program merupakan evaluasi yang berkaitan erat dengan suatu program atau kegiatan pendidikan termasuk diantaranya tentang kurikulum, sumber daya manusia, penyelenggara program, proyek penelitian dalam suatu lembaga. Program dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang direncanakan dengan seksama, tujuan penting pengambilan keputusan. Program merupakan salah satu hasil kebijakan yang penetapannya melalui proses yang panjang dan disepakati oleh para pengelolanya untuk dilaksanakan oleh civitas akademik maupun tenaga administrasi.

Arikunto (2009:5) menyatakan definisi evaluasi program yang terkenal dikemukakan oleh (Ralph Tyler, 1950) yang mengatakan bahwa “evaluasi

program adalah proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan sudah dapat terealisasi” definisi yang lebih diterima oleh masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi Cronbach (1963) dan Stufflebeam (1971). Mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah supaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Wilbur Harris (1968) (dalam Sudjana, 2008 :18) mengemukakan *evaluation is the systematic process of judging the worth, desirability, effectiveness, or adequacy of something according to definitive criteria and purposes. The judgement is based upon a careful comparison of observation data with criteria standards.* Pengertian ini menjelaskan bahwa evaluasi program adalah suatu proses penetapan secara sistematis tentang nilai, tujuan, efektifitas, atau kecocokan sesuatu sesuai dengan kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penetapan keputusan itu didasarkan atas pertimbangan secara hati-hati terhadap data yang diobservasi dengan menggunakan standar tertentu yang telah dibakukan

Suatu kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pengambil keputusan belum tentu dapat terealisasi dengan baik sesuai dengan jiwa kebijakan untuk mengetahui seberapa jauh dan bagaimana yang belum tercapai serta apa penyebabnya, perlu adanya evaluasi program. Tanpa adanya evaluasi keterlaksanaan program maka efektifitas dan respon para objek kebijakan juga sulit untuk diungkap.

Wirawan (2011:17) menyatakan program adalah kegiatan atau aktivitas yang dirancang untuk melaksanakan kebijakan dan dilaksanakan dalam waktu yang tidak terbatas. Lebih lanjut Wirawan mengatakan :

Menurut objeknya evaluasi dapat dikelompokkan menjadi : (a) evaluasi kebijakan adalah rencana umum dan dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugas menteri, kebijakan berlangsung terus sampai dicabut atau digantikan dengan kebijakan baru, umumnya karena kebijakan yang lama tidak efektif dan efisien, atau karena pergantian pejabat; (b) evaluasi program adalah metode sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar mengenai program; (c) proyek adalah kegiatan atau aktifitas yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu untuk mendukung pelaksanaan program

Arikunto (2009:18) menyatakan tujuan dari evaluasi program adalah untuk mengetahui pencapaian tujuan program dengan langkah mengetahui keterlaksanaan kegiatan program, karena evaluator program ingin mengetahui bagian mana dari komponen dan sub komponen program yang belum terlaksana, dan apa penyebabnya. Apabila suatu program tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan dapat terlaksana. Informasi dari kegiatan evaluasi program sangat berguna bagi pengambilan keputusan dan kebijakan lanjutan dari program, karena dari masukan evaluasi program itulah pengambil keputusan akan menentukan tindak lanjut dari program yang sedang atau sudah dilaksanakan.

Wujud dari hasil evaluasi program adalah sebuah rekomendasi dari evaluator untuk pengambil keputusan (decision maker). Ada empat kemungkinan yang dapat dilakukan berdasarkan hasil dalam pelaksanaan evaluasi program, yaitu: (1) Menghentikan program, karena dipandang bahwa program tersebut tidak ada manfaatnya, atau tidak dapat terlaksana sebagaimana diharapkan; (2) Merevisi

program, karena ada bagian-bagian yang sesuai dengan harapan (terdapat kesalahan tetapi hanya sedikit); (3) Melanjutkan program, karena pelaksanaan program menunjukkan bahwa segala sesuatu sudah berjalan sesuai dengan harapan dan memberikan hasil dan bermanfaat; (4) Menyebarkan program, (melaksanakan program ditempat-tempat lain atau mengulangi program di lain waktu), karena program tersebut berhasil dengan baik maka sangat baik jika dilaksanakan lagi ditempat dan waktu yang lain.

2.6 Model-model Evaluasi Program

Sebelum merancang dan mendesign evaluasi, langkah yang harus dilakukan adalah menetapkan model evaluasi yang akan digunakan, berikut adalah model-model evaluasi :

2.6.1 Model *Goal Oriented Evaluation*

Wirawan (2011:81) mengatakan model evaluasi Tyler dikenal dengan evaluasi berbasis tujuan yang secara umum mengukur apakah tujuan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan, program atau proyek dapat dicapai atau tidak. Dengan pengertian tersebut maka evaluasi yang dilaksanakan hanya mengumpulkan informasi apakah tujuan yang ditetapkan oleh suatu kebijakan, program atau proyek sudah tercapai atau belum kemudian digunakan untuk mengambil keputusan dan pertanggung jawaban.

Berdasarkan penjelasan diatas evaluasi berdasarkan tujuan cocok diterapkan untuk mengevaluasi program yang jenisnya pemrosesan dalam bentuk pembelajaran.

Peninjauan atas keterlaksanaan tujuan dilaksanakan terus menerus dan berkesinambungan

2.6.2 Model *Goal Free Evaluation*

Model *Goal Free Evaluation* diterjemahkan sebagai evaluasi bebas tujuan, menurut Arikunto (2009:53) evaluasi bebas tujuan tidak berarti melupakan tujuan sama sekali atau tidak memberikan batasan kepada evaluator, bahkan melarang untuk melupakan tujuan program, tetapi memberikan peringatan agar tidak bekerja terlalu rinci pada tujuan khusus yang dapat menjurus pada tujuan umum. Berdasarkan kesimpulan dapat difahami bahwa penggunaan evaluasi bebas tujuan sama saja dengan penggunaan evaluasi berorientasi pada tujuan

2.6.3 Model Evaluasi *Sumatif dan Formatif*

Evaluasi sumatif dan evaluasi formatif adalah evaluasi yang sangat akrab dengan kegiatan guru, karena dalam pembelajaran selalu dianjurkan menggunakan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. Wirawan (2011:89) mengatakan evaluasi sumatif adalah evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program. Evaluasi sumatif mengukur kinerja akhir obyek yang dievaluasi.

Wirawan (2011:86) mendefinisikan evaluasi formatif adalah suatu evaluasi yang didesign dan dipakai untuk memperbaiki suatu objek, terutama ketika obyek tersebut sedang dikembangkan. Dengan demikian evaluasi formatif adalah mengetahui seberapa jauh program yang dirancang dapat dilaksanakan. Penerapan evaluasi formatif dalam dunia pendidikan biasanya berbentuk ujian tengah semester.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi formatif dapat dilaksanakan pada penggalan kegiatan, sedangkan evaluasi sumatif dilaksanakan pada akhir kegiatan.

2.6.4 Model Evaluasi *Countenance*

Sukardi (2012:60) mengatakan model evaluasi *Countenance* secara garis besar memiliki dua kelengkapan utama yang tercakup dalam “data Matrik” yaitu matrik deskripsi dan matrik keputusan, setiap matrik dibagi dua kolom, yaitu kolom tujuan dan kolom pengamatan. Berdasarkan uraian evaluasi *countenance* dapat disebut evaluasi pertimbangan. Karena pada evaluasi ini selalu membandingkan kondisi hasil pelaksanaan program dengan standar yang diperuntukkan bagi program tersebut.

2.6.5 Model Evaluasi CSE-UCLA

CSE-UCLA terdiri dari dua singkatan, yaitu CSE (*Center for the study of evaluation*) dan UCLA (*University of California in Los Angeles*). Menurut Arikunto (2012:44) model evaluasi CSE-UCLA adalah evaluasi yang membagi evaluasi kedalam lima tahapan yaitu: 1) perencanaan; 2) pengembangan; 3)implementasi; 4) hasil; 5) dampak.

Berdasarkan uraian evaluasi CSE-UCLA cukup baik dan lengkap mulai dari perencanaan sampai mengevaluasi dampak sebuah program.

2.6.6 Model Evaluasi CIPP

Wirawan (2011:92) mengatakan model evaluasi CIPP dikembangkan oleh Daniel Stufflebeam pada tahun 1966, yang mendefinisikan evaluasi sebagai proses melukiskan (*delineating*), memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif-alternatif pengambilan keputusan.

Dalam pelaksanaan evaluasi program, terdapat banyak model yang dikemukakan oleh para ahli. Definisi evaluasi yang lebih diterima oleh masyarakat luas dikemukakan oleh dua orang ahli evaluasi yaitu Cronbach dan Stufflebeam dalam Suharsimi Arikunto (2009:5), mereka mengemukakan bahwa evaluasi program adalah upaya menyediakan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan.

Kecenderungan evaluasi program saat ini sering disebut dengan monev kepanjangan dari monitoring dan evaluasi, yang mengandung makna pemangku kebijakan menghendaki evaluasi secara lengkap. Model evaluasi yang cukup lengkap adalah model evaluasi CIPP yang diperkenalkan oleh Stufflebeam, Yusuf Tayibnafis (2008:5) model evaluasi dari Stufflebeam mengemukakan evaluasi yang berfokus pada empat aspek yaitu: (1)konteks; (2) Input; (3) Proses implementasi; (4) Produk.

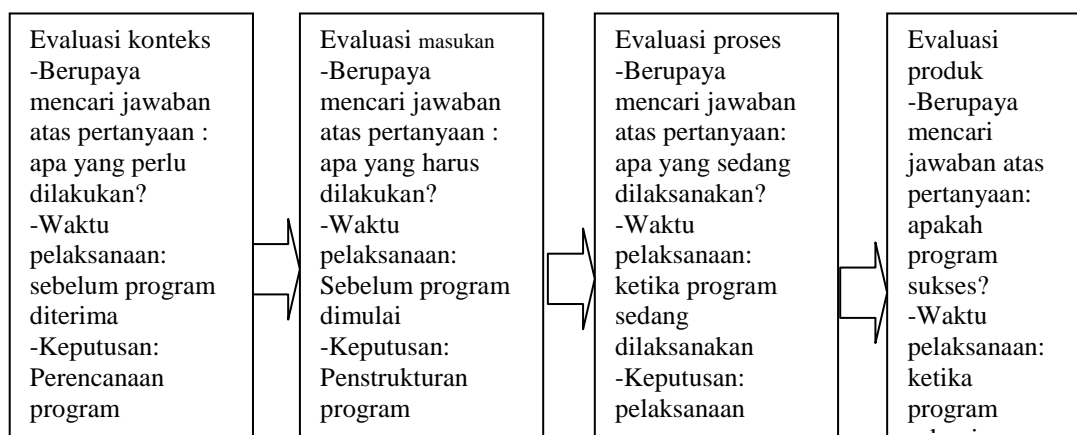
Sukardi (2012:63) mengatakan evaluasi model CIPP pada garis besarnya melayani empat macam keputusan:

1. Perencanaan keputusan yang mempengaruhi pemilihan tujuan umum dan tujuan khusus,

2. Keputusan pembentukan atau structuring, yang kegiatannya mencakup pemastian strategi optimal dan design proses untuk mencapai tujuan yang telah diturunkan dari keputusan perencanaan,
3. Keputusan implementasi, pada putusan ini para evaluator mengusahakan sarana-prasarana untuk menghasilkan dan meningkatkan pengambilan keputusan atau eksekusi, rencana, metode dan strategi yang hendak dipilih,
4. Keputusan pemutar (ecycling) yang menentukan, jika suatu program itu diteruskan, diteruskan dengan modifikasi dan atau diberhentikan secara total atas dasar kriteria yang ada.

Model evaluasi CIPP merupakan kerangka yang komprehensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi formatif dan sumatif terhadap obyek program, proyek, personalia, produk, institusi dan sistem. Model CIPP terdiri dari empat jenis evaluasi yaitu: evaluasi konteks, evaluasi masukan, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Menurut Stufflebeam keempat evaluasi digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Evaluasi Model CIPP



Sumber : Cronbach dan Stufflebeam dalam Suharsimi Arikunto (2009:5)

Evaluasi Konteks adalah evaluasi untuk menjawab pertanyaan apa yang perlu dilakukan? (Whats need to be done?). Evaluasi ini mengidentifikasi dan menilai kebutuhan-kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program.

Evaluasi Input, evaluasi ini untuk mencari jawaban atas pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan? (What should be done?), evaluasi masukan mengidentifikasi problem, aset, dan peluang untuk membantu para pengambil keputusan mendefinisikan tujuan, prioritas, dan manfaat dari proogram, menilai pendekatan alternatif, rencana tindakan, rencana staff, dan anggaran untuk feasibilitas dan potensi cost effectiffenes untuk mengetahui kebutuhan dan tujuan yang ditargetkan. Para pengambil keputusan memakai evaluasi masukn dalam memilih diantaranya rencana-rencana yang ada, menyusun proposal pendanaan, alokasi sumber-sumber, menempatkan staf, menjadwal pekerjaan, menilai rencana-rencana aktifitas, dan penganggaran.

Evaluasi Proses, berupaya mencari jawaban atas pertanyaan: apakah program sedang dilaksanakan? (is it being done?), evaluasi ini mengakses pelaksanaan dari rencana untuk membanti staf program melaksanakan aktifitas dan kemudian membantu kelompok pemakai yang lebih luas menilai program dan menginterpretasikab manfaat.

Evaluasi Produk, diarahkan untuk mencari jawaban pertanyaan: Did it succed?, evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan atau tidak direncanakan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya untuk membantu kelompok-kelompok pemakai lebih luas

mengukur kesuksesan upaya dalam mencapai kebutuhan-kebutuhan yang ditargetkan.

Stufflebeam dalam wirawan (2011:189) mengembangkan panduan bagi evaluator dalam melaksanakan model evaluasi CIPP, terjemahan bebasnya sebagai berikut :

Evaluasi konteks, mengakses kebutuhan, aset, dan problem dalam lingkungan yang ditetapkan, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut:

Aktivitas evaluator dalam evaluasi konteks adalah mengumpulkan dan mengakses kebutuhan, informasi, dan latar belakang, mewawancarai pemimpin program untuk menelaah dan mendiskusikan perspektif mereka mengenai kebutuhan untuk mengidentifikasi setiap problem yang perlu diselesaikan, menilai tujuan program kaitannya dengan kebutuhan dan aset aset potensial yang bermanfaat, serta pelibatan stakeholder yang terkait dengan program sejak awal penyusunan

Tabel 2.2 Aktivitas evaluator dalam evaluasi konteks

Aktifitas evaluator	Tujuan program
Mengumpulkan dan mengakses kebutuhan, informasi, dan latar belakang.	Memakai temuan temuan evaluasi konteks untuk menyelesaikan dan atau mengklasifikasi tujuan.
Mewawancarai pemimpin program untuk menelaah dan mendiskusikan prespektif mereka mengenai kebutuhan untuk mengidentifikasi setiap problem yang perlu diselesaikan dalam program.	Memakai temuan temuan evaluasi konteks untuk menelaah dan merevisi tujuan program.
Menilai tujuan program kaitannya dengan kebutuhan dan aset aset potensial yang bermanfaat.	Memakai temuan temuan evaluasi konteks sepanjang atau pada akhir program, untuk membantu menilai efektifitas program dalam memenuhi kebutuhan.

Evaluasi input, menjaring, menganalisis dan menilai mengenai strategi, rencana kerja dan anggaran, mengidentifikasi dan meneliti program lain yang dapat digunakan sebagai model untuk program yang direncanakan, mencari fakta untuk menentukan kecukupan anggaran dalam aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3 Aktivitas evaluator dalam evaluasi input

Aktifitas evaluator	Tujuan program
Mengidentifikasi dan meneliti program lain yang dapat digunakan sebagai model untuk program yang direncanakan.	Memakai temuan evaluasi masukan untuk merencanakan suatu strategi program yang ekonomis.
Menilai strategi program untuk menentukan kecukupan dalam membiayai pekerjaan yang dibutuhkan.	Memakai temuan evaluasi masukan untuk mendukung permintaan pendanaan kegiatan yang direncanakan.
Menilai manfaat strategi program dengan membandingkan alternatif strategi yang digunakan dalam program serupa.	Memakai temuan evaluasi masukan untuk tujuan pertanggung jawaban dalam rasionalisasi strategi program yang dipilih.

Evaluasi proses, evaluasi proses monitoring, mendokumentasikan, dan menilai aktifitas program, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.4 Aktivitas evaluator dalam evaluasi proses

Aktifitas evaluator	Tujuan program
Mengumpulkan dan menilai seberapa tinggi individu dan kelompok sasaran konsisten dengan kemanfaatan program yang direncanakan.	Memakai temuan evaluasi proses untuk memperkuat desain program.
Secara periodik mewawancarai personil sekolah untuk mempelajari perspektif mereka mengenai bagaimana program dapat berhasil.	Memakai temuan evaluasi proses untuk menyusun rekaman kemajuan program.
Menentukan seberapa jauh program telah memenuhi target.	Memakai temuan evaluasi proses untuk melaporkan kemajuan program kepada kepala sekolah.

Aktivitas evaluator dalam evaluasi proses adalah mengumpulkan dan menilai seberapa tinggi individu dan kelompok sasaran konsisten dengan kemanfaatan program yang direncanakan, Secara periodik mewawancarai personil pelaksana program untuk mempelajari perspektif mereka mengenai bagaimana program dapat berhasil, menentukan seberapa jauh program telah memenuhi target.

Evaluasi produk, menjaring dan menilai data mengenai program yang mencapai sasaran yang telah ditargetkan, aktifitas evaluator dilukiskan dalam tabel berikut

Tabel 2.5 Aktivitas evaluator dalam evaluasi produk

Aktifitas evaluator	Tujuan program
Mengakses dan membuat penilaian mengenai sampai seberapa tinggi individu atau kelompok yang memperoleh manfaat dari program yang telah direncanakan.	Memakai temuan evaluasi produk untuk menilai apakah program tercapai atau tidak tercapai target yang telah ditetapkan.
Secara periodik mewawancarai personil sekolah untuk mempelajari perspektif mereka mengenai bagaimana program dapat memotivasi peserta didik.	Memakai temuan evaluasi produk untuk menilai sampai seberapa banyak program penjaminan mutu dapat berpengaruh dan memberi manfaat.
Memberi informasi untuk perbaikan program selanjutnya.	Memakai temuan evaluasi produk untuk menilai seberapa tinggi program penjaminan mutu dapat memenuhi terget yang telah ditetapkan.

2.7 Penelitian yang relevan

Dalam sebuah penelitian diperlukan keberadaan acuan teori. Melalui hasil berbagai penelitian dapat dijadikan sebagai data pendukung penelitian baru. Salah satu data pendukung yang perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan kejadian atau objek yang sedang di teliti, dalam hal ini berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan sebuah kebijakan/program. Adapun penelitian yang relevan yang menjadi referensi penulis yaitu :

1. Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis 12 tahun pada SMA, SMK, dan MA di Kab. Sumbawa Barat, oleh Lutfiah Ruswati Pasca Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta 2014

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan gratis 12 tahun yang dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat bagi pemerintah daerah, kepala sekolah, guru, dan wali murid serta bermanfaat secara optimal bagi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis.

Jenis penelitian ini adalah penelitian evaluasi, menggunakan pendekatan diskriptif kuantitatif dengan model CIPP (*context, input, process dan product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam. Penelitian ini menggunakan populasi Sekolah SMA, SMK, dan MA di Kabupaten Sumbawa Barat dengan pengambilan sampel menggunakan *cluster random sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut: 1). Hasil evaluasi konteks: respon masyarakat terhadap dampak kebijakan pendidikan gratis sangat positif tetapi partisipasi masih rendah. 2). Input: dari data guru dan siswa sudah baik karena dilihat dari rasio siswa per guru dan kualifikasi pendidikan sebagian besar S1 sedangkan dari sisi ketersediaan sarana prasarana sekolah dalam kategori baik/ tinggi. 3). Proses: dari proses belajar mengajar ditemukan bahwa kinerja guru dengan responden siswa dalam kategori baik/tinggi, dan responden guru sangat tinggi sementara hasil temuan motivasi belajar siswa baik/ tinggi. 4). Produk: prestasi akademik siswa dilihat dari nilai UN siswa ditemukan dalam kategori baik/tinggi. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan pendidikan gratis 12 tahun dilihat dari respon masyarakat, kinerja guru, motivasi belajar siswa dan prestasi akademik siswa tidak menurun atau dalam kategori baik/tinggi

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah adalah model evaluasi yang digunakan yaitu menggunakan evaluasi model cipp dalam mengevaluasi kebijakan sekolah gratis.

Perbedaan penelitian ini adalah metode dan sampel yang digunakan, metode yang digunakan selain menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, juga ditambah dengan menggunakan angket / ceklist kuosioner. Dan sampel yang digunakan juga lebih dari dua sekolah

2.Evaluasi Model CIPP Pada Renstra Dinas Ketenagakerjaan Kota Yogyakarta Tahun 2014, oleh Muhammad Agil Zulkarnaen, Program Pasca Sarjana FISIPOL Universitas Gajah Mada.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi renstra dan pelaksanaannya pada dinas ketenaga kerjaan kota yogyakarta.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan rancangan evaluasi model CIPP, dengan menggunakan metode pembanding tetap

Hasil dari Penelitian ini menunjukkan keempat aspek yang dievaluasi pada level konteks yaitu renstra telah memiliki latar belakang yang jelas dalam penyusunannya, penyusunan kebijakan telah memiliki maksud dan tujuan yang terstruktur dan penyusunan telah melibatkan stakeholder yang terkait, pada level evaluasi input renstra telah memiliki kesiapan SDM yang terdukung dalam satuan struktur institusi, institusi telah memiliki serapan kesiapan anggaran yang memadai, dan renstra telah disetting dan disosialisasikan dengan baik kepada para stakeholder, pada level evaluasi proses pelaksanaan renstra telah mengikuti alur waktu yang didesign sejak awal namun terjadi kendala yang cukup substansial yaitu renstra tidak difahami secara seksama oleh semua pemangku kepentingan, karena hanya segelintir orang yang

benar-benar memahami renstra sebagai bagian penting pelaksanaan tujuan, pada level evaluasi product renstra telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada model evaluasi yang digunakan serta pada metode yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah kebijakan yang dievaluasi bukan pada bidang pendidikan.

2. Applying the Context, Input, Process, Product Evaluation Model for Evaluation, Research, and Redesign of an Online Master's Program, **Hatice Sancar Tokmak**, **H. Meltem Baturay**, and **Peter Fadde** Mersin University, Turkey, Ipek University, Turkey, Southern Illinois University Carbondale (SIUC), United States

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mendesain ulang program gelar master online yang terdiri dari 12 program dari bidang informatika menggunakan konteks, input, proses, produk (CIPP) model evaluasi. Penelitian yang dilakukan selama desain ulang program secara online diikuti metodologi campuran di mana data dikumpulkan melalui survei CIPP, kelompok fokus wawancara, dan kuesioner terbuka. Sebuah survei CIPP awal dikirim ke siswa, yang memiliki tingkat respon dari sekitar 60%, menunjukkan bahwa kursus Fuzzy Logic tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan siswa. Berdasarkan temuan ini, para manajer program memutuskan untuk meningkatkan kursus ini, dan kelompok fokus diselenggarakan dengan siswa dari kursus Fuzzy Logic untuk mendapatkan informasi lebih lanjut untuk membantu dalam mendesain ulang kursus.

Dengan demikian, tentu saja didesain ulang untuk memasukkan lebih banyak contoh dan visual, termasuk video; interaksi siswa-instruktur ditingkatkan melalui pertemuan tatap muka; dan pertemuan tambahan yang diatur sebelum ujian sehingga contoh tambahan dapat disajikan untuk pemecahan masalah untuk memuaskan siswa tentang prosedur penilaian. Terakhir, modifikasi saja Fuzzy Logic dilaksanakan, dan siswa dalam kursus dikirim bentuk terbuka meminta mereka apa yang mereka pikir tentang modifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar siswa senang dengan versi baru dari kursus.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah model evaluasi yang digunakan

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang saya lakukan adalah pada objek yang dievaluasi yaitu berupa program kursus baru yang diberikan kepada siswa

2.8 Kerangka Pikir

Penelitian ini ditujukan kepada kebijakan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan, yang telah disusun berdasarkan identifikasi awal mengenai permasalahan yang kemudian muncul kepada semua stake holder yang terlibat menjadi objek dalam pelaksanaan kebijakan ini,

Kerangka fikir penelitian ini dibangun berdasarkan fokus penelitian dalam empat aspek yang dievaluasi dalam kebijakan ini yaitu, evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk.

Evaluasi konten yang diteliti dalam penelitian ini adalah mencakup dasar kebijakan, tujuan kebijakan, dan penyusunan kebijakan

Evaluasi input dalam penelitian ini mencakup kesiapan anggaran, kesiapan SDM sekolah, dan serta bagaimana respon dan partisipasi masyarakat

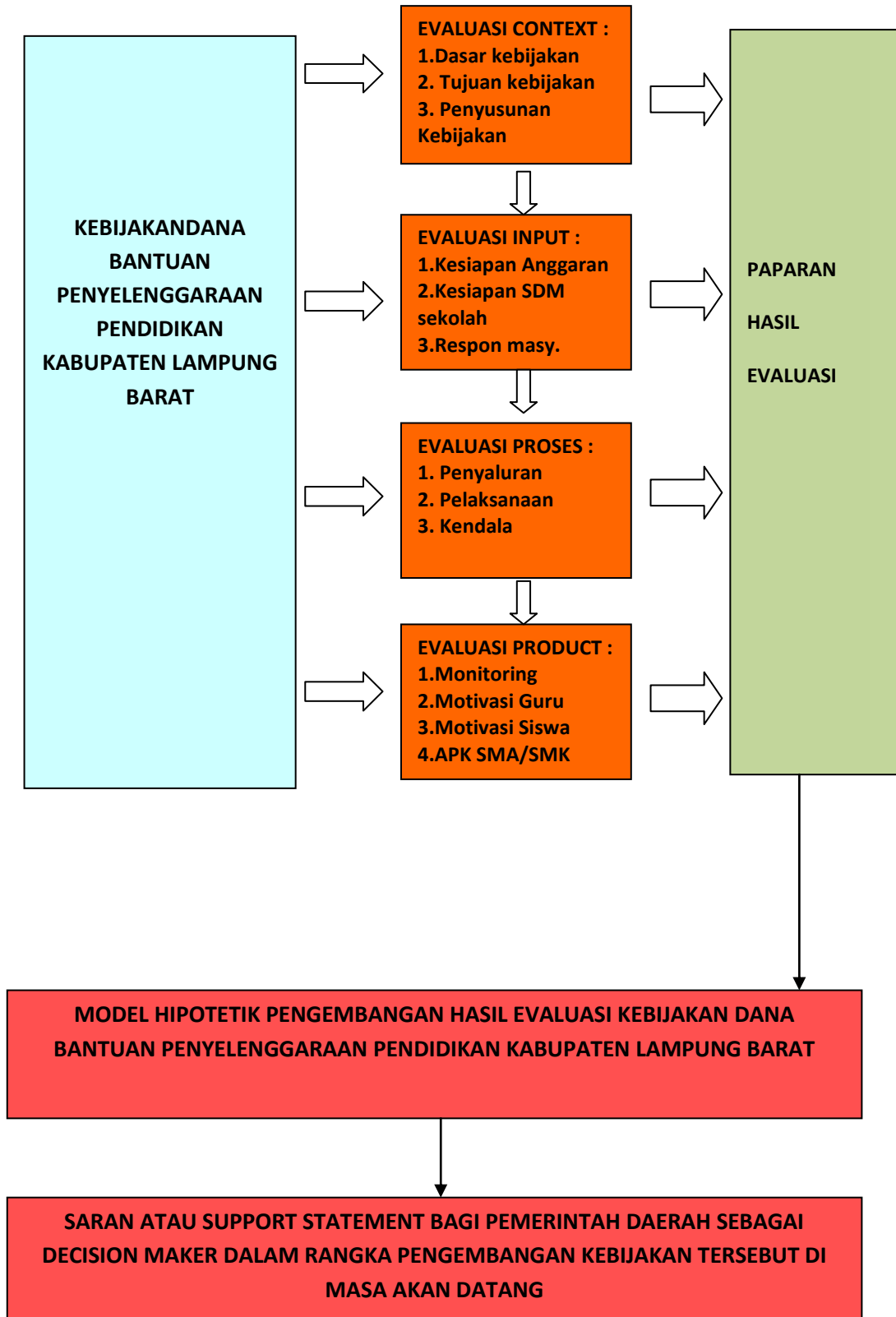
Evaluasi proses dalam penelitian ini mencakup penyaluran dana dari pihak pemerintah daerah kepada pihak sekolah, pelaksanaan di sekolah, serta bagaimana kendala pelaksanaan

Evaluasi produk dalam penelitian ini mencakup monitoring, motivasi guru, dan siswa, serta bagaimana efek kebijakan ini terhadap peningkatan APK SMA/SMK di Kabupaten Lampung Barat.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis hasil evaluasi terhadap empat aspek kebijakan ini dan memaparkannya dalam bentuk deskriptif kualitatif. Yang diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran atas hasil pelaksanaan kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten Lampung Barat

Hasil dari evaluasi ini dapat diberikan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai sebuah gambaran tentang seperti apa kebijakan ini telah dilaksanakan sampai dengan saat ini. Selain itu juga dapat dikembangkan sebuah model hipotetik pengembangan hasil penelitian ini berkaitan dengan seperti apa model evaluasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan dana BPP yang ada di Kabupaten Lampung Barat.

maka kerangka berfikir yang dapat penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.2 Kerangka Fikir Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis paparkan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk membuat instrumen, cara pengumpulan data, menganalisis data, dan cara untuk membantu peneliti sampai pada kesimpulan. Metode penelitian penulis sajikan sebagai berikut:

3.1 Latar Penelitian

Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu pemekaran dari Kabupaten Lampung utara, yang ber-Ibukota di Liwa. Pemilihan Liwa sebagai ibu kota Kabupaten Lampung Barat memang tepat. Beberapa alasan memperkuat pernyataan ini adalah:

- 1) tempatnya strategis karena berada di tengah-tengah wilayah Lampung Barat, sehingga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh daerah Lampung Barat oleh pemerintah kabupaten akan relatif efektif
- 2) Liwa merupakan persimpangan lalu lintas jalan darat dari berbagai arah yaitu Sumatra Selatan, Bengkulu, dan Lampung sendiri. Tentang asal-usul nama Liwa, menurut cerita orang, berasal dari kata-kata "meli iwa" (bahasa Lampung), artinya membeli ikan. Konon dahulunya Liwa merupakan daerah yang subur, persawahan yang luas, sehingga hasil

pertaniannya melimpah. Liwa juga nama salah satu marga dari 84 marga di Lampung.

Ibu kota kabupaten ini terletak di Liwa. Kabupaten ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tanggal 16 Agustus 1991 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Lampung Utara. Kabupaten ini dominan dengan perbukitan dengan pantai di sepanjang pesisir barat Lampung. Daerah pegunungan yang merupakan punggung Bukit Barisan, ditempati oleh vulkanik quarter dari beberapa formasi. Daerah ini berada pada ketinggian 50 - > 1000 mdpl. Daerah ini dilalui oleh sesar Semangka, dengan lebar zona sebesar \pm 20 Km. Pada beberapa tempat dijumpai beberapa aktivitas vulkanik dan pemunculan panas bumi.

Dengan luas wilayah lebih kurang 3.368,14 km² Setelah pemekaran Kabupaten Pesisir Barat atau 10,6 % dari luas wilayah Provinsi Lampung dan mempunyai garis pantai sepanjang 260 km. Lampung Barat terletak pada koordinat 4^o,47',16" - 5^o,56',42" lintang selatan dan 103^o,35',08" - 104^o,33',51" Bujur Timur. Saat ini kabupaten terbagi dalam 25 kecamatan yang secara geografis di diminasi oleh daerah perbukitan dan gunung.

Dalam bidang pertanian khususnya hortikultura, Kabupaten Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten penghasil sayur mayur terbesar di Provinsi Lampung. Ini menunjukkan potensi alam yang dimiliki oleh kabupaten Lampung barat sekaligus menyiratkan profesi sebagian besar masyarakatnya yaitu bertani.

3.1.1 SMK Negeri 1 Kebuntebu

SMKN 1 Kebuntebu merupakan SMK pertama yang didirikan di kabupaten Lampung Barat, sehingga secara tidak langsung menjadi pelopor pendidikan kejuruan di Kabupaten Lampung Barat. SMKN 1 Kebuntebu terletak di Jalan A. Bandaniji Suja'i, Pekon Tribudisyukur Kecamatan Kebuntebu Kabupaten Lampung Barat. Sekolah ini berada di daerah pegunungan akan tetapi sudah cukup ramai. Sebagaimana karakteristik pedesaan sekolah ini dikelilingi perkebunan kopi dibawah gunung abung dengan jarak tempuh 84 km dari pusat kota kabupaten dan 186 km dari pusat propinsi bandar lampung. Berdiri di atas tanah seluas 4 Ha dengan dikelilingi pagar tembok setinggi kurang lebih 2 meter. Meskipun letaknya di daerah, gedung dan sarana dan prasarana pendidikan yang sudah cukup memadai untuk kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan standar nasional pendidikan.

Tahun 1997 Kanwil Propinsi Memprogramkan untuk membangun Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka salah satu utusan Kanwil Propinsi Lampung mencari lahan untuk pendirian SMK, Saat itu diukurlah tanah yang memang diperuntukkan untuk lahan pendidikan. Hasil pengukuran tanah diperoleh luas tanah sebesar 120 meter x 480 meter sedangkan yang dipersyaratkan untuk membangun SMK adalah seluas, 4 Ha.

SMKN 1 Kebuntebu sendiri saat ini memiliki 5 program keahlian yaitu teknik otomotif, teknik instalasi tenaga listrik, teknik arsitektur, pemasaran, dan agribisnis pembibitan dan kultur jaringan tanaman. Saat ini memiliki 65 tenaga pendidik. SMKN 1 Kebuntebu memiliki total jumlah siswa sebanyak 875 siswa.

Dan saat ini sedang diproses oleh direktorat P SMK untuk menjadi salah satu SMK Rujukan.

Kurikulum yang digunakan pada saat ini masih menggunakan kurikulum KTSP. Menjadi strategis dengan minat masyarakat yang cukup tinggi menyekolahkan anaknya ke SMK karena tingkat ekonomi orang tua yang rata-rata petani. Dan berpersepsi tidak akan mampu menyekolahkan mereka hingga ke perguruan tinggi.

3.1.2 SMK Negeri 1 Liwa

SMK Negeri 1 Liwa terletak di pusat ibukota kabupaten Lampung barat. Transportasinya mudah dijangkau dari semua arah, dilalui banyak jalur angkutan kota. Hal ini dikarenakan Liwa merupakan pusat seluruh roda pemerintahan Kabupaten Lampung Barat. Kemudahan dalam hal transportasi ini memicu warga masyarakat untuk mendorong aktivitas PBM tepat waktu. Jarak SMK Negeri 1 Liwa dengan kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat kurang lebih 10 kilo meter menjadikan SMK Liwa mendapatkan kelancaran kegiatan untuk urusan-urusan eksternal sekolah yang berkaitan dengan pihak Dina Pendidikan. Jika ditempuh dengan kendaraan umum waktu tempuh yang diperlukan kira-kira 15 menit.

SMK Negeri 1 Liwa memiliki jumlah tenaga edukatif sebanyak 62 guru. Dilihat dari usia tenaga pengajarnya umumnya berusia muda aatau dikatakan masih sangat produktif dan hampir semua guru yang mengajar di SMK Negeri 1 Liwa ini berijazah sarjana dan hanya sedikit jumlahnya yang berijazah D3 (diploma).

Namun kondisi ekonomi dan tingkat pendidikan orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya rata-rata masih berprofesi sebagai petani sekitar, ini menjadikan motivasi siswa untuk belajar serta mengikuti pelajaran tambahan tidak terlalu tinggi. Umumnya mereka tidak mau bahkan tidak ada yang ikut. Ini disebabkan orang tua kurang memperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Ditinjau dari fasilitas (sarana dan prasarana), SMK Negeri 1 Liwa umumnya telah memiliki berbagai fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan mutu sekolah, seperti ruang UKS, perpustakaan, mushola, dan ruang Lab Perhotelan, akuntansi, pemasaran dan teknologi informatika.

Selain sarana dan prasarana yang membuat masyarakat tertarik menyekolahkan anaknya di SMK Negeri 1 Liwa tersebut adalah kedisiplinan sekolah, kualitas prestasi sekolah, program-program peningkatan sekolah. Program-program peningkatan sekolah selalu diinformasikan kepada warga sekolah dan orang tua murid. Proses ini dilaksanakan secara bersama-sama antara sekolah dan orang tua siswa. Proses ini dilaksanakan secara bersama-sama antara kepala sekolah dan guru dalam menyusun RAPBS yang kemudian diperiksa oleh komite sekolah.

3.2 Pendekatan dan Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan rancangan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak berupa keterangan-keterangan dan penjelasan yang bukan berbentuk angka. Menurut Rahardjo & Gudnanto dalam Arikunto (2011:250) adalah suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integratif dan komprehensif sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh

perkembangan diri yang baik. Pendapat lain disampaikan oleh Best dalam Arikunto (2011:24) yang menyatakan bahwa studi deskriptif berkenaan dengan segala sesuatu yang bermakna deskriptif atau keterangan berupa kalimat dan bukan angka.

Sebagai konsekuensi dalam pendekatan kualitatif maka teknik analisa data yang peneliti digunakan bukan dengan teknik statistik seperti pada pendekatan penelitian kuantitatif, tetapi dengan teknik analisis data non statistik atau analisis dengan prinsip logika. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala yang bersifat alamiah/naturalistik dan mendasar sehingga tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun di lapangan. Pada pendekatan kualitatif, data diperoleh dari wawancara berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah.

Moleong (2011:49) mengemukakan penelitian kualitatif pada hakekatnya merupakan suatu upaya untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih membenarkan kebenaran. Sugiono (2013:231) menyatakan bahwa penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata atau gambar, tidak mementingkan angka, tetapi lebih pada proses. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan secara cermat, mendalam dan rinci sehingga dapat mengumpulkan data yang lengkap dan dapat menghasilkan informasi yang menunjukkan kualitas sesuatu, dan hasil penelitiannya hanya berlaku bagi wilayah yang diteliti.

Moleong (2011:4) mengatakan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang individu secara holistik dan utuh. Dalam melakukan penelitian ini *setting* berlangsung di ruang kepala sekolah sebagai tempat sumber informasi dalam observasi, ruang kelas akselerasi sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, ruang Usaha Kesehatan Sekolah, ruang guru, ruang Bimbingan Penyuluhan, ruang perpustakaan dan sebagainya, yang peneliti anggap bermanfaat sebagai tempat sumber data.

Setting penelitian berarti tempat yang dijadikan lokasi penelitian, yakni di SMK Negeri 1 Kebun Tebu dan SMK Negeri 1 Liwa. *Setting* penelitian dalam pendekatan kualitatif merupakan hal yang sangat penting dan telah ditentukan ketika menempatkan fokus penelitian. *Setting* penelitian ini menunjukkan komunitas yang akan diteliti dan sekaligus kondisi fisik dan sosial.

3.3 Kehadiran Peneliti

Untuk mendapatkan data yang valid dan objektif terhadap apa yang diteliti maka kehadiran peneliti dilapangan dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Kehadiran peneliti sebagai pengamat langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti sangat menentukan hasil penelitian, maka dengan cara riset lapangan sebagai pengamat penuh secara langsung pada lokasi penelitian peneliti dapat menemukan dan mengumpulkan data secara langsung. Jadi dalam penelitian ini, instrumen penelitian adalah peneliti sendiri yang sekaligus sebagai pengumpul data. Sedangkan instrumen yang lain merupakan instrumen pendukung atau pelengkap sehingga kehadiran peneliti dilapangan sangat diperlukan.

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah untuk mengamati secara langsung kegiatan yang berlangsung, fenomena sosial dan gejala psikis yang terjadi di sekolah. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengamati langsung apakah kejadian tersebut berbeda jauh atau tidak dengan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara. Untuk dapat memahami makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti memberikan penjelasan dalam menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa peneliti harus menjadi instrumen kunci penelitian.

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan dapat diperoleh dengan mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesanyang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian.

Tabel 3.1 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti dalam Pengumpulan Data Melalui Teknik Wawancara

No	Nara Sumber	Jabatan	Waktu
1.	Drs. Nukman,MS.MM	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat	15 Maret 2016 Pukul 09.45 WIB s.d 10.30 WIB
2.	Drs. Abdullah Kodri	Kasubbag Perencanaan BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat	Selasa,15 Maret 2016, pukul. 13.30 WIB s.d 14.00 WIB
3.	Erwiensyah Husein,SH	Kasubbid Pendidikan, Hukum, dan Pembangunan BAPPEDA Kabupaten Lampung Barat	Selasa, 22 September 2015, pukul. 13.10 WIB s.d 14.00 WIB
4.	Jopi Haspika,S.Pd	Guru SMK N 1 Liwa	17 Maret 2016 pukul 10.10 WIB s.d 10.30 WIB
5.	Dewi Angrum Sari,S.Pd	Guru SMK N 1 Kebun Tebu	18 Maret 2016 pukul 10.10 WIB s.d 10.30 WIB
6.	Salmawati,SE	Guru SMK N 1 Kebun Tebu	18 Maret 2016 Pukul 09.45 WIB s.d 10.15 WIB
7.	Renata Maria Ulfa,S.Pd	Guru SMK N 1 Liwa	17 Maret 2016 Pukul 10.30 WIB s.d 11.00 WIB
8.	Muhammad Yusuf Musis,S.Pd,MM	Kepala SMK N 1 Liwa	17 Maret 2016 Pukul 13.15 WIB s.d 14.00 WIB
9.	Drs. Hatriopar, MM	Kepala SMK N 1 Kebun Tebu	18 Maret 2016 Pukul 08.15 s.d 09.00 WIB
10.	Ading Suarna	Tokoh Masyarakat (Tebu)	19 Maret 2016 Pukul 09.00 WIB s.d 08.45 WIB
11.	Sudarman,Ama.Pd	Tokoh Masyarakat (Tebu)	19 Maret 2016 Pukul 10.15 WIB s.d 11.00 WIB
12.	Azhari	Tokoh Masyarakat (Liwa)	22 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB s.d 10.45 WIB
13.	Joko Gustomo	Tokoh Masyarakat (Liwa)	22 Maret 2016 Pukul 13.00 WIB s.d 13.45 WIB
14.	Erdin Agus Setiawan	Siswa SMK N 1 Kebun Tebu	21 maret 2016 Pukul 10.05 WIB s.d 10.25 WIB
15.	Puji Lestari	Siswa SMK N 1 Kebun Tebu	16 Maret 2016 Pukul 11.05 WIB s/d 11.25 WIB

16.	Ambarwati	Siswa SMK N 1 Liwa	17 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB s.d 10.15 WIB
17.	Manisah	Siswa SMK N 1 Liwa	17 Maret 2016 Pukul 10.05 WIB s.d 10.20 WIB
18.	Mirna Indrarini Bakri M.Pd	Bendahara BPP SMK N 1 Liwa	17 Maret 2016 Pukul 15.30 WIB s.d 14.00 WIB
19.	Elfi Yusilawati S.Pdi	Bendahara BPP SMK N 1 Liwa	18 Maret 2016 Pukul 10.10 WIB s.d 10.30 WIB

Tabel 3.2 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti dalam Pengumpulan Data Melalui Teknik Observasi

No	Objek Observasi	Waktu
1.	Semua sarana dan prasarana SMK N 1 Kebun Tebu	15 Maret 2016 Pukul, 01.00 WIB s.d 02.00 WIB
2.	Semua sarana dan prasarana SMK N 1 Liwa	20 Maret 2016 Pukul, 08.00 WIB s.d 10.00 WIB

Tabel 3.3 Pelaksanaan Kehadiran Peneliti dalam Pengumpulan Data Melalui Teknik Dokumentasi

No	Objek Dokumentasi	Waktu
1.	Peraturan Bupati tentang JUKLAK dan JUKNIS dana BPP	17 Maret 2016 Pukul, 09.00 WIB s.d 10.00 WIB
2.	Format pelaporan dana BPP	25 Maret 2016 Pukul, 11.00 WIB s.d 12.00 WIB
3.	Tabel pos anggaran	23 Maret 2016 Pukul 10.00 WIB s.d 11.00 WIB
4.	Dokumen kelengkapan pencairan dana	24 Maret 2016 Pukul, 12.00 WIB s.d 13.00 WIB
5.	Visi Misi dan renstra SMK N 1 Kebun Tebu	25 Maret 2016
6.	Visi Misi dan renstra SMK N 1 Liwa	26 Maret 2016

3.4 Sumber Data Penelitian

Bungin (2008:119) menyatakan bahwa data adalah keterangan tentang sesuatu objek penelitian yang diperoleh dilokasi penelitian. Pengertian data menurut Arikunto (2002:96), adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa catatan maupun angka

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa data adalah informasi yang akan diketahui kebenarannya tentang sesuatu objek penelitian baik berupa fakta ataupun angka yang akan menjadi dasar untuk dianalisis dalam penelitian. Sumber data adalah berupa data primer (manusia) dan data sekunder. Sumber data primer diantaranya kepala sekolah, guru, dan siswa. Data sekunder adalah data yang bersumber dari dokumen dan foto yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer. Karakteristik data sekunder berupa tulisan, rekaman, gambar atau foto (Moleong 2013:42).

Tabel 3.2. Daftar Nara sumber

No	Nara sumber	Jumlah
1.	Dinas Pendidikan	1
2.	Bappeda kabupaten	2
3.	Kepala Sekolah	2
4.	Guru	4
5.	Tokoh Masyarakat	4
6.	Siswa	4
7.	Bendahara BPP	2
Jumlah		19

Sumber data dalam penelitian ini ditentukan dengan *Purposive Sampling*. Peneliti menentukan informan yang akan digali informasinya atas dasar pertimbangan tertentu. Informan pertama adalah pemilik. Pemilik dijadikan sebagai sumber data karena pemilik tentu menginginkan lembaganya tumbuh dan berkembang untuk mencapai visi dan misinya mendirikan sebuah lembaga

pendidikan. Informan kedua adalah Kepala Sekolah. Kepala Sekolah ditetapkan sebagai informan dengan pertimbangan bahwa Kepala Sekolah yang paling bertanggung jawab atas lancar atau tidak lancarnya kegiatan sekolah, tertib atau silang sengketa kegiatan sekolah. Pertimbangan lain adalah pastilah Kepala Sekolah adalah orang pertama yang akan diajak berdiskusi untuk membahas permasalahan, tantangan, dan proyeksi-proyeksi yang akan dilakukan.

Informan setelah Kepala Sekolah adalah tokoh masyarakat karena selain kepala sekolah, tokoh masyarakat juga berperan aktif dalam pengembangan sebuah kebijakan. Yang selanjutnya adalah siswa, karena siswa merupakan subjek yang menerima manfaat dari adanya kebijakan tersebut. Setelah siswa adalah bendahara BPP karena bendahara merupakan orang yang berperan aktif dan yang mengelola biaya dari kebijakan tersebut. Selanjutnya adalah Informan terakhir adalah perwakilan guru yang ditentukan oleh perkembangan yang terjadi di lapangan. Informan guru murni atas dasar analisis peneliti dengan tetap berpijak kepada objektivitas dan independensi peneliti yang bertanggung jawab sebagai orang yang paham atas etika keilmuan.

Adapun secara lebih rinci alur data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 3.3 Alur Sumber Data Penelitian

NO	EVALUASI	DIMENSI	INFORMAN
1.	Konteks	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Kebijakan - Tujuan Kebijakan - Penyusunan Kebijakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas - Kepala Sekolah - Bappeda - Guru - Masyarakat
2.	Input	<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan Anggaran daerah - Rasio siswa dan guru 	<ul style="list-style-type: none"> - BAPPEDA - Kepala Sekolah

		<ul style="list-style-type: none"> - Kesiapan SDM sekolah - Respon dan Partisipasi masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat
3.	Proses	<ul style="list-style-type: none"> - Peyaluran Dana - Pelaksanaan di sekolah - Kendala Pelaksanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Sekolah - Tim Pelaksana BDP di sekolah
4.	Produk	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring - Motivasi Guru - Prestasi Siswa - APK dan APM SMK Kabupaten Lambar 	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Dinas Pendidikan - Siswa - Guru

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan dengan masalah, dan tujuan penelitian. Sugiyono (2013:279), pengumpulan data kualitatif sebagai data primer, dilakukan dalam waktu yang bersamaan dan diharapkan peneliti mampu menemukan fenomena-fenomena baru yang sebelumnya belum pernah ada, selanjutnya mengkonstruksi fenomena-fenomena tersebut sehingga fenomena-fenomena yang kompleks menjadi lebih jelas. Moleong (2011:235), pengumpulan data yang dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan, dokumen atau secara gabungan, pengumpulan data akan dapat menghasilkan catatan-catatan tertulis. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian dengan pendekatan kualitatif inidalam hal untuk pengumpulan data yang dilakukan terhadap objek dilakukan dengan cara:

3.5.1 Observasi

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang diamati. Banyaknya

periode observasi yang perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. Observasi itu dilakukan pada sejumlah orang, dan hasil observasi itu digunakan untuk mengadakan perbandingan antar orang-orang tersebut, maka observasi terhadap masing-masing orang dilakukan dalam situasi yang relatif sama. Sebelum observasi itu dilaksanakan, pengobservasi (*observer*) telah menetapkan terlebih dahulu aspek-aspek apa yang akan diobservasi.

Aspek-aspek tersebut telah dirumuskan secara operasional, sehingga “tingkah laku” yang akan dicatat nanti dalam observasi hanyalah apa-apa yang telah dirumuskan tersebut. Observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur.

Observasi berstruktur, aspek-aspek “tingkah laku” yang diobservasi telah dimuat dalam suatu daftar yang telah disusun secara sistematis. Bentuk catatan yang sistematis yaitu: daftar cek (*check list*), adalah suatu daftar yang memuat catatan tentang sejumlah “tingkah laku” yang akan diobservasi. Skala bertingkat (*rating scale*), adalah gejala yang akan diobservasi dalam tingkatan yang telah ditentukan. Kelemahan dari observasi berstruktur ini adalah bahwa pengobservasi sangat terikat dengan daftar yang telah tersusun sehingga ia tidak mungkin mengembangkan observasinya dengan aspek-aspek lain yang kebetulan terjadi selama observasi berlangsung. Untuk mengatasi kelemahan ini, dapat ditempuh dengan cara kombinasi, yaitu menggunakan suatu daftar yang terperinci tentang tingkah laku yang diobservasi, yang dilengkapi dengan blanko untuk mencatat tingkah laku tertentu yang muncul, yang belum terekam dalam daftar.

Hal-hal yang diobservasi dalam penelitian ini diantaranya: kondisi sekolah (ruang guru, ruang kelas, ruang bengkel otomotif sepeda motor, bengkel otomotif mobil, ruang multimedia, bengkel listrik,).

3.5.2 Wawancara

Penulis berbekal instrumen berupa panduan wawancara, daftar pertanyaan, dan alat perekam dengan cara mendatangi nara sumber untuk mendapatkan data yang diinginkan. Hal ini karena salah satu metode pengumpulan data adalah dengan jalan wawancara, yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Wawancara merupakan salah satu bagian terpenting dari setiap penelitian kualitatif. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Wawancara adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang pewawancaranya menetapkan masalah dan pertanyaan yang akan diajukan (lihat lampiran 1). Peneliti menggunakan jenis wawancara ini untuk mencari jawaban yang diinginkan. Keuntungan wawancara ini jarang mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan terwawancara untuk tidak berdusta.

3.5.3 Dokumentasi

Selain wawancara, penulis juga memeriksa sejumlah dokumen. Berdasarkan teori dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Sugiyono (2013:83) dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode ini merupakan suatu cara mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga diperoleh data yang lengkap sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Alasan peneliti menggunakan metode ini adalah: (1) sebagai bukti untuk pengujian, (2) merupakan sumber yang stabil dan kaya akan informasi, (3) relatif mudah diperoleh, (4) lebih bersifat alamiah, (5) untuk memperluas cakrawala pengetahuan peneliti terhadap situasi lingkungan yang diteliti. Dokumen dalam penelitian ini adalah berupa Peraturan Bupati, Lembar Format Pelaporan Dana, Tabel Pos Anggaran Dana, Kelengkapan Dokumen Pencairan Dana.

3.6 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan analisis data ini diharapkan data yang diperoleh akurat, benar dan valid. Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan dari data tersebut, dicarikan data lagi secara berulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul.

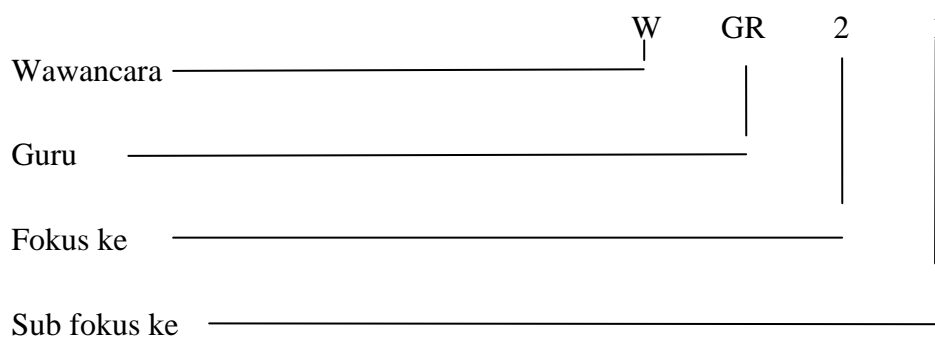
Analisis data dalam penelitian evaluasi dana BPP ini, dilakukan sebelum peneliti memasuki lapangan, pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis masalah penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kebijakan dana BPP.

Secara operasional transkrip wawancara dibaca secara berulang-ulang untuk dipilih yang terkait dengan fokus penelitian dan diberi kode berdasarkan subfokus penelitian dan sumbernya. Pemberian kode sangat diperlukan untuk memudahkan pelacakan data secara bolak-balik. Secara rinci pengkodean dibuat berdasarkan pada teknik pengumpulan data dan informasi seperti pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Pengkodean Informan

Teknik pengumpulan data	Kode	Sumber data	Kode
Wawancara	W	Kepala Dinas	KD
Observasi	O	Bappeda	BPD
Dokumentasi	D	Kepala sekolah,	KS
		Bendahara BPP	BDH
		Guru.	GR
		Siswa	SSW
		Tokoh Masyarakat	MSY

Pemberian kode memudahkan pemasukkan ke dalam matrik cek dan tingkat kejenuhan dan menghindari adanya data penting tertinggal. Penggunaan matrik cek data memudahkan penentuan tingkat kejenuhan pada setiap fokus penelitian penelitian dan menghindari kesulitan analisis karena menumpuknya data pada akhir periode pengumpulan data. Penggunaan kode informan ditunjukkan pada gambar berikut;



Gambar 3.1 Sistem pengkodean informan pada penelitian ini

Kode W adalah wawancara, kode GR menunjukkan Guru, kode 2 angka pertama adalah informan ke 2 yang penulis wawancarai, kode 1 angka kedua menunjukkan fokus kesatu dari 4 fokus penelitian yang diteliti.

3.6.1 Reduksi Data

Penulis mereduksi data untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data yang penulis lakukan merupakan proses pengumpulan data penelitian. Peneliti menemukan data dari menerapkan metode wawancara, observasi, dokumentasi, atau berbagai dokumen yang berhubungan dengan sistem rekrutmen, penempatan, pembinaan, penggajian, promosi, mutasi, *reward and punishment*, hak cuti, kewajiban karyawan, dan pemutusan hubungan kerja, faktor penghambat dan faktor pendukung manajemen tenaga pendidik. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya data tambahan bila diperlukan.

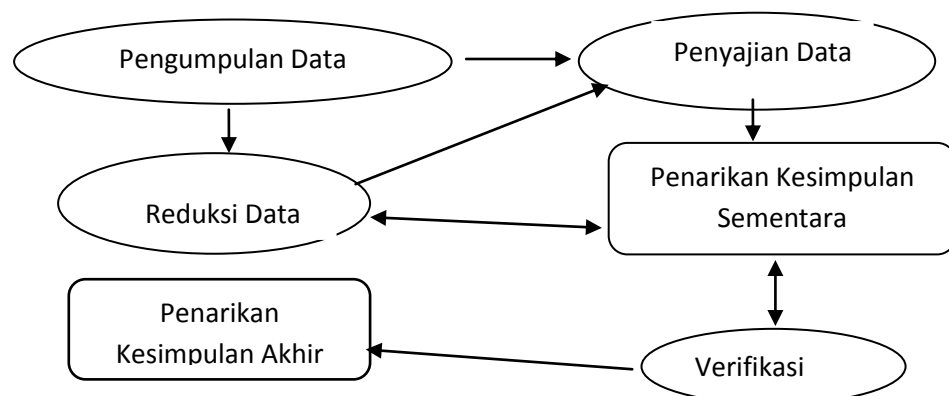
3.6.2 Penyajian Data

Setelah direduksi data, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut maka terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan yang diteliti.

3.6.3 Penarikan Kesimpulan

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display data sehingga data dapat disimpulkan. Penarikan kesimpulan sementara, untuk diuji kembali dengan data dilapangan dengan cara merefleksi kembali, peneliti berkonsultasi dengan ahli dalam hal ini pembimbing 1 yaitu Dr. Riswanti Rini, M.Si, dan Pembimbing 2 yaitu Dr. Sowiyah, M.Pd kemudian menyatukan pendapat keduanya agar pada akhirnya apa yang penulis telah tulis dalam paparan data penelitian secara kebenaran ilmiahnya dapat tercapai.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan bagaimana evaluasi kebijakan dana bantuan penyelenggaraan pendidikan pada SMK di Kabupaten Lam. Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini digambarkan dalam pada bagan alur seperti dibawah ini:



Gambar 3.2. Langkah Analisis Data Berdasarkan Model Interaktif Miles dan Huberman (1984) yang dimodifikasi

3.7 Keabsahan Data

Pengecekan kredibilitas atau derajat keabsahan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan. Derajat kepercayaan data (*kesahihan data*) dalam penelitian kualitatif digunakan untuk memenuhi kriteria (*nilai*) kebenaran, baik bagi pembaca maupun bagi subjek yang diteliti.

Pengecekan keabsahan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian kualitatif yaitu untuk mengetahui dan mengecek kebenaran data yang diperoleh, maka dilakukan pengecekan kredibilitas data dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik pemeriksaaan keabsahan data, dapat juga dilakukan dengan melalui kriteria kredibilitas dengan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan meningkatkan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Hal tersebut penting artinya karena penelitian kualitatif berorientasi pada situasi, sehingga dengan perpanjangan keikutsertaan dapat memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati. Disamping itu membangun kepercayaan antara subjek dan peneliti memerlukan waktu yang cukup lama.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik keabsahan data melalui pengecekan atau membandingkan data penelitian dengan berbagai cara.

c. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. Diskusi dengan teman sejawat memberikan kesempatan awal yang baik untuk menjajaki dan menguji hipotesis yang muncul dari pemikiran peneliti. Ada kemungkinan permasalahan muncul dalam benak peneliti. Metode ini digunakan dengan cara mengekspose hasil sementara maupun hasil akhir penelitian yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan beberapa teman atau informan, subjek peneliti dan dosen pembimbing yang membantu dalam penelitian ini. Diskusi dilakukan untuk mendapatkan kebenaran hasil dari penelitian. Dengan demikian validitas dari penelitian ini dapat diandalkan.

d. Ketekunan Pengamatan

Dalam pengamatan penelitian yang dilakukan ini ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat rentan dengan persoalan yang sedang dicari kemudian pemusatan pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan istilah lain ketekunan pengamatan akan menghasilkan kedalaman pemahaman terhadap permasalahan

3.8 Tahapan dalam Penelitian

Dalam penelitian ini proses pengumpulan data dibagi dalam tiga tahap yaitu: tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengecekan data.

- a. Tahap persiapan yaitu pengamatan awal untuk memantapkan permasalahan penelitian dan menentukan subjek penelitian. Pengumpulan data yaitu untuk mengamati dan mencari berbagai informasi yang berhubungan dengan fokus dan permasalahan penelitian yaitu mengenai evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses dan evaluasi product dari kebijakan dana BPP di SMK N 1 Kebun Tebu dan SMK N 1 Liwa. Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu di uji secara empiris.
- b. Pengecekan data, setelah menganalisis data peneliti harus memastikan apakah interpretasi dan temuan penelitian akurat. Pengecekan data perlu dilakukan untuk membuktikan apakah yang diamati oleh peneliti benar dan sesuai dengan apa yang terjadi secara wajar di lapangan. Selanjutnya tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi:
 - 1) **Menyusun proposal penelitian**, kegiatan menyusun proposal diawali dari melihat ke dalam diri tentang ketertarikan dan kemampuan penulis terhadap tema penulisan tesis. Selanjutnya penulis mengajukan judul kepada pembimbing sebagai acuan penelitian. Penulis katakan sebagai acuan karena pada tahap selanjutnya judul dapat berubah sesuai dengan tesis secara

keseluruhan. Kemudian penulis mengajukan kepada pembimbing dan mengumpulkan bahan penulisan meliputi buku-buku dan jurnal yang relevan.

2) **Mengurus perijinan**, setelah judul disetujui pembimbing, penulis mengurus perizinan penelitian dari prodi

3) **Melakukan pengambilan data di lapangan**, pengambilan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan mengecek dokumen yang tersedia.

4) **Menyusun laporan penelitian akhir**, setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya penulis menyusun laporan penelitian. Penulisan laporan penelitian selalu berkonsultasi dengan pembimbing

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi dengan metode CIPP pada penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut.

Evaluasi dana bantuan penyelenggaraan pendidikan Kabupaten Lampung Barat belum sepenuhnya memberikan evaluasi yang positif namun dalam sebagian besar poin yang dievaluasi telah menunjukkan hasil yang positif dari adanya kebijakan ini di Kabupaten Lampung Barat

a. **Pada evaluasi konteks**, yaitu: (1) dasar dilahirkannya kebijakan tersebut memiliki latar belakang yang jelas dan sudah terpenuhi dalam data dan regulasi yang digunakan sebagai dasar kebijakan dana BPP; (2) tujuan dan maksud dari kebijakan telah menjadi prioritas pencapaian yang utama dan tertuang jelas dalam regulasi; (3) Proses penyusunan kebijakan ini telah melalui alur yang melibatkan berbagai stakeholder terkait mulai dari pemangku kepentingan teratas pada level kabupaten sampai pada pihak sekolah dalam hal ini adalah kepala sekolah juga telah dilibatkan sejak awal, sehingga secara bersama-sama oleh semua pihak apa yang menjadi dasar, maksud dan tujuan serta mengapa dilahirkan kebijakan ini secara jelas dan transparan telah diketahui sampai pada level pelaksana kebijakan,

meskipun dalam hal ini guru belum memiliki pengetahuan yang lebih mengenai kebijakan ini

b. Pada evaluasi input, yaitu: (1) strategi yang diterapkan sejak awal terkait dengan analisis kesiapan anggaran dan alur penetapan anggaran daerah dalam hal ini APBD yang menjadi sumber dana dalam kebijakan ini telah melalui proses yang sistematis, dan secara jangka panjang telah terbukti bahwa Kabupaten Lampung Barat siap untuk terus melanjutkan kebijakan ini, diperkuat dengan fakta bahwa selama pelaksanaan kebijakan ini sejak tahun 2009 hingga saat ini belum terjadi defisit anggaran yang jika itu terjadi dapat menyebabkan dihentikannya dana bantuan ini; (2) Dalam kesiapan SDM disekolah juga telah disiapkan dengan baik tidak ada penolakan dalam pelaksanaan kebijakan ini, dan tim pengelola disekolah telah memahami dengan baik tentang seperti apa kebijakan ini akan dijalankan serta telah disosialisasikan dengan baik oleh pihak kepada masyarakat yang akan menjadi partisipan dan objek dalam kebijakan ini; (6) Sehingga dengan hal tersebut Respon dan partisipasi masyarakat dinilai cukup positif dalam menyambut berjalannya kebijakan ini

c. Pada evaluasi proses, yaitu: (1) Terdapat pemahaman yang sama dan tidak menimbulkan ambiguitas tentang alur penyaluran dan pencairan dana mulai sejak pengajuan data oleh pihak sekolah sampai pada pencairan, pemerintah juga membuat alur yang tidak rumit dalam hal ini namun tetap melibatkan semua unsur penting yang berkaitan dengan proses pencairan dana; (2) Pelaksanaan di sekolah dapat berjalan dengan baik, tidak ada penolakan atau protes dari guru maupun personil sekolah lainnya mengenai pelaksanaan kebijakan ini disekolah, namun

sekolah kurang memberikan sosialisasi yang transparan kepada para siswa tentang besaran dana yang diterima oleh masing-masing siswa, selain itu dalam penggunaan pos anggaran dinas pendidikan telah memberikan batasan yang jelas bagi semua sekolah tentang jumlah-jumlah dana dalam setiap pos, dan ini berbeda di masing-masing sekolah, ini menunjukkan suatu pemahaman yang baik dari dinas pendidikan tentang kondisi di masing-masing sekolah, selain itu di dua sekolah yang dijadikan situs penelitian sarana dan prasarana telah terpenuhi dengan sangat baik meskipun sekolah tersebut tidak lagi menerapkan iuran komite sekolah, ini menunjukkan bahwa dalam konteks ketercukupan dana dapat dengan baik diefektifkan oleh pihak sekolah; (3) berkaitan dengan kendala pelaksanaan belum ditemui kendala yang berarti selama proses pelaksanaan kebijakan ini, hanya saja pada saat menunggu pencairan pada termin berikutnya sekolah harus mencari strategi untuk menutupi kebutuhan yang ada di sekolah.

d. Pada evaluasi hasil (*Product*), yaitu: (1) Tujuan sudah dicapai oleh pihak pemerintah daerah ;(2) kebutuhan individu belum semua terpenuhi pihak sekolah; (3) Kebijakan ini sedikit banyak memberi pengaruh terhadap motivasi guru, terutama bagi guru honor (guru tidak tetap) berkaitan dengan adanya penyeragaman honor per jam di seluruh sekolah menggunakan indeks dana ini, sehingga ada sekolah yang pembayaran bagi guru tidak tetapnya justru menurun setelah adanya kebijakan ini. Namun menyoal motivasi mengajar lebih jauh guru tidak terpengaruh secara langsung dengan adanya kebijakan ini; (4) Dalam hal motivasi siswa untuk melanjutkan pendidikan, kebijakan ini memberi pengaruh yang cukup positif cukup baik dengan diterapkannya kebijakan ini karena mereka/orang tua mereka merasa terbantu dengan tidak lagi adanya pungutan

biaya komite; (5) Yang terakhir kebijakan ini juga telah dipandang memiliki hasil jangka panjang setidaknya-tidaknyanya mampu meningkatkan APK pada semua jenjang pendidikan.

5.2 Implikasi

Implikasi merupakan akibat langsung atau konsekuensi atas hasil / temuan dari suatu penelitian. Berdasarkan kesimpulan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat untuk meneruskan kebijakan dana BPP dengan perbaikan pada beberapa aspek yang menjadi penghambat dalam pelaksanaannya. Dengan dana BPP sebagai *guidelines* pendidikan membawa implikasi terhadap capaian tujuan peningkatan partisipasi masyarakat pada satuan pendidikan SMA/K di Kabupaten Lampung Barat. Dampak nyata nya adalah bertambahnya data APK di Kabupaten Lampung Barat, hal ini merupakan implikasi inovasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat berhasil dalam memberikan jaminan pendidikan bagi masyarakat miskin sekaligus memberikan kesempatan masyarakat untuk mengenyam di sekolah yang lebih bermutu. Melihat hasil penelitian atas kebijakan dana BPP, sudah selayaknya kebijakan serupa bisa diselenggarakan di daerah-daerah lainnya dengan memperkuat aspek-aspek yang menjadi temuan penelitian dana BPP di Kabupaten Lampung Barat.

5.2.1 Implikasi Teoritis

Dengan penggunaan model CIPP, didapatkan hasil informasi yang merupakan *feedback* terhadap pelaksanaan kebijakan dana BPP. Hal ini memberikan

implikasi terhadap keharusan perbaikan terhadap beberapa aspek, seperti pada kajian teoritis sebelumnya menyebutkan bahwa pentingnya kesamaan persepsi mendorong suksesnya suatu program (Stufflebeam dalam Arikunto;2012). Temuan di lapangan berdasarkan kajian teori penghabat implementasi memberikan gambaran bahwa kebijakan dana BPP masih ditemukan beberapa faktor yang bisa menghambat suksesnya tercapainya tujuan dari kebijakan ini

5.2.2 Implikasi Metodologis

Dari kajian analisis lapangan menggunakan metode kualitatif yang didasarkan pada model CIPP, berhasil didapatkan informasi yang berguna bagi kebijakan ini. Informasi dengan metode kualitatif yang penting dalam kerangka perbaikan kebijakan ini. Dari hasil penelitian, implikasi pada kebijakan dana BPP dinilai baik untuk dilanjutkan kembali tetapi masih diperlukan perbaikan di beberapa aspek, seperti kelengkapan peraturan dan aturan penjabar dari peraturan tersebut. Kemudian, CIPP terbukti mampu menghasilkan informasi yang baik seperti teori yang dibangun dari model ini yaitu menghasilkan informasi yang komprehensif terhadap suatu kebijakan/program. Dari penelitian ini terdapat pelajaran penting yang bisa digunakan oleh para pemangku kebijakan dalam memberikan pertimbangan dalam keberlanjutan kebijakan dana BPP . Berikut disampaikan *Lesson Learned* dan catatan hasil penelitian :

1. Peraturan yang menjadi dasar dari kebijakan ini dinilai masih ditemui kelemahan. Hal ini perlu perbaikan dari pemangku kebijakan dalam merumuskan kembali kebijakan tersebut.

2. Kebijakan dana BPP mempunyai tujuan mulia, hal ini membutuhkan dukungan dari seluruh masyarakat, khususnya pemangku kebijakan. Dukungan tersebut baik bersifat politis maupun komitmen dalam kerangka memperkuat landasan kebijakan dana BPP.

3. Sudah saatnya kebijakan subsidi semacam ini dibarengi dengan strategi peningkatan mutu karena tantangan pendidikan saat ini di daerah, tidak hanya dalam hal bagaimana meningkatkan partisipasi namun juga memberi efek mutu yang berkualitas dari output pendidikan yang dihasilkan.

4. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan dana BPP mendapat dukungan yang sangat positif dari masyarakat, namun disisi lain pelaksanaannya di sekolah dalam kebijakan ini dinilai masih belum mewujudkan azas dari peraturan yang mendasarinya yaitu tidak diskriminatif.

5.3 Saran

➤ **Bagi Pihak Pemerintah Daerah**

1. Kebijakan ini baik untuk terus dilanjutkan, sesuai dengan harapan yang tertampung dari pendapat semua pihak, hanya saja dalam hal pengindeksan jumlah dana persiswa hendaknya menyesuaikan secara real kebutuhan masing-masing jenjang pendidikan, karena indeks ini sangat mempengaruhi efektifitas dan ketercukupan dana yang diberikan kepada pihak sekolah, mengingat sudah tidak lagi dibolehkan memungut biaya kepada masyarakat/orang tua siswa.

2. Dengan adanya wacana pemindahan pengelolaan pendidikan menengah atas kepada pihak dinas provinsi, maka hendaknya jika di tingkat SMA/SMK akan dihentikan pada tahun depan, hendaknya benar-benar disosialisasikan dengan baik kepada pihak terkait dengan kebijakan ini, agar tidak terjadi kerancuan dan kebingungan dalam masyarakat
3. Sudah saatnya pihak dinas juga memiliki strategi peningkatan mutu pendidikan di sekolah untuk mendampingi kebijakan pendanaan ini
4. Agar benar-benar melakukan monitoring langsung dengan turun langsung dan melihat kondisi pelaksanaan di sekolah secara rutin tidak hanya berdasarkan Laporan Pertanggung Jawaban diatas kertas, karena sesungguhnya pembinaan bersifat tatap muka secara langsung dapat memberikan efek yang baik bagi kebijakan ini

➤ Bagi Pihak Sekolah

1. Agar siswa di sosialisasikan dengan baik juga tentang kebijakan ini karena siswa pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan ini, setidaknya mereka mengetahui besaran dana yang mereka terima dari pemerintah melalui pihak sekolah
2. Agar sekolah juga melaksanakan kebijakan ini dengan terus mengacu pada pelayanan pendidikan yang berorientasi kepada mutu, artinya sekolah perlu melakukan terobosan-terobosan tentang bagaimana mengelola dana yang ada menuju layanan pendidikan yang semakin berorientasi kepada mutu.

➤ Bagi Masyarakat / Orang Tua

1. Agar terus termotivasi menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang yang lebih tinggi, karena dalam semua level pendidikan pemerintah pusat ataupun daerah telah menunjukkan keberpihakan yang baik dalam konteks pendanaan pendidikan bersubsidi bagi masyarakat

Untuk terus ikut mengawal proses pelaksanaan kebijakan, tidak hanya menjadi objek dalam pelaksanaan, namun masyarakat juga bagian yang berhak mengevaluasi setiap kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2006. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Suara Bebas.
- Alifuddin, M. 2011. *Kebijakan Pendidikan Non Formal : Teori, Aplikasi dan Implikasi*. Jakarta: Magna Ascript Publishing.
- Arikunto, S. Dan Yuliana. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gajahmada University Press.
- Emzir, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Penerbit Rajawali Press.
- Fattah, Nanang. 2009. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Hussaini, U. 2009. *Manajemen Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Hough, J.R. 1984. *Educational Policy: An International Survey*. London: Croom Helm
- Imron, Ali. 1995. *Kebijakan Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Khairul Muluk, *Desentralisasi Teori, Cakupan dan Elemen*.
<http://www.publik.brawijaya.ac.id>
- Miles, BM dan Huberman, MA. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Peraturan Bupati Lampung Barat No.07 Tahun 2015 *Tentang Biaya Penyelenggaraan Pendidikan*
- Peraturan Bupati Lampung Barat No.09 Tahun 2015 *Tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Pendidikan*
- Ruswati, Lutfiah. 2013. *Tesis Evaluasi Dampak Kebijakan Pendidikan Gratis 12 Tahun Pada SMA, SMK dan MA di Kabupaten Sumbawa Barat*. Universitas Negeri Yogyakarta

- _____. *Sejarah Lampung Barat*. 2015. <http://disdik.lambar.go.id> (diakses pada tanggal 25 Juli 2015)
- Senduk, J.F. 2010. *Pola Pembuatan Kebijakan Pendidikan*. (Tesis). Sulawesi Utara. Universitas Negeri Manado.
- Suryadi, Ace dan Dasim Budimansyah. 2009. *Paradigma Pembangunan Pendidikan Nasional: Konsep, Teori, dan Aplikasi Dalam Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Suryono, Yoyon. 2000. *Arah Kebijakan Otonomi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta. FIP UNY
- Syafarudin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. 2008. *Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wirawan, 2011. *Evaluasi Teori, Model, Standar Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Pt.Absurd Garfindo Bandung Perkasa.
- Yoyon, B.I. 2011. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori, dan Model*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Perkasa